

**STUDI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2018-2022**

Tesis

**Oleh:
SASMIKA DWI SURYANTO
NPM 2126021010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STUDI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2018-2022**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**

Oleh:

**SASMIKA DWI SURYANTO
NPM 2126021010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STUDI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018-2022

Oleh

SASMIKA DWI SURYANTO

Persentase penduduk miskin Kabupaten Mesuji selalu terkecil di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, namun di sisi lain IPM Kabupaten Mesuji juga terendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peningkatan IPM di Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022 dan mengapa IPM Kabupaten Mesuji selalu terendah di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion*, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis bagaimana peningkatan IPM menggunakan teori/konsep pertumbuhan IPM dan analisis mengapa IPM Kabupaten Mesuji tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya menggunakan teori *Human Development Indeks*. Hasil penelitian dengan analisis peningkatan IPM, menemukan bahwa peningkatan IPM Kabupaten Mesuji dari 62,88 di tahun 2018 menjadi 64,94 di tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang positif sebesar 3,28% per tahun atau 0,81% per tahun. Tren pertumbuhan yang positif belum dapat mengubah posisi IPM Kabupaten Mesuji di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan masih jauh dari rata-rata IPM Provinsi sebesar 70,45 serta belum memenuhi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi ini karena sejak awal IPM Mesuji sudah tertinggal jauh dari rata-rata Provinsi Lampung. Hasil analisis ketertinggalan IPM menemukan beberapa hal yang diidentifikasi menghambat peningkatan IPM, yaitu: intervensi kebijakan belum dapat mengubah *mindset* masyarakat yang kurang memandang penting pendidikan; pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan yang masih kurang; akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil yang masih sulit; dominasi sektor informal, tingkat pendapatan dan kurangnya lapangan pekerjaan formal; kondisi infrastruktur yang kurang mendukung; sinkronisasi dan efektivitas kebijakan dalam penyusunan program, anggaran, koordinasi antar instansi, monitoring dan evaluasi yang kurang efektif; serta akurasi dan basis data yang kurang tepat. Aspek terlemah yang sekaligus dapat menjadi pengungkit untuk peningkatan IPM Kabupaten Mesuji adalah Indeks Pengetahuan meliputi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Kata Kunci: Evaluasi, Indeks Pembangunan Manusia, Mesuji

ABSTRACT

A STUDY ON THE IMPROVEMENT OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN MESUJI REGENCY IN 2018–2022

By

SASMIKA DWI SURYANTO

The poverty in Mesuji Regency has consistently been the lowest among Regencies/Cities in Lampung Province, however, on the other hand, Mesuji Regency's Human Development Index (HDI) is also the lowest. This research aims to analyze how the HDI in Mesuji Regency improved from 2018 to 2022 and why Mesuji Regency's HDI consistently ranks lowest among Regencies/Cities in Lampung Province. Data were collected through Focus Group discussions, interviews, and documentation. Data validity was ensured using source and technical triangulation. The analysis of HDI improvement utilized the theory/concept of HDI growth, while the analysis of why Mesuji Regency's HDI lags behind other Regencies/Cities used the Human Development Index theory. The research findings from the HDI improvement analysis indicate that Mesuji Regency's HDI increased from 62.88 in 2018 to 64.94 in 2022, demonstrating a positive growth trend of 3.28% per year or 0.81% annually. This positive growth trend has not yet altered Mesuji Regency's HDI position among Regencies/Cities in Lampung Province and remains significantly below the Provincial HDI average of 70.45, as well as falling short of the targets set in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). This condition is attributed to Mesuji's HDI being substantially lower than the Lampung Province average from the outset. The analysis of HDI disparity identified several factors hindering HDI improvement, including: policy interventions that have not effectively changed the public's undervaluing of education; persistent disparities in educational facilities and quality; limited access to healthcare services in remote areas; the dominance of the informal sector, low-income levels, and a scarcity of formal employment opportunities; inadequate infrastructure conditions; insufficient synchronization and effectiveness of policies in program formulation, budgeting, inter-agency coordination, and monitoring and evaluation; and inaccurate data and unreliable databases. The weakest aspect, which simultaneously presents a leverage point for improving Mesuji Regency's HDI, is the Knowledge Index, encompassing the Average Years of Schooling (RLS) and Expected Years of Schooling (HLS).

Keywords: *Evaluation, Human Development Index, Mesuji*

Judul Tesis : **STUDI PENINGKATAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN
MESUJI TAHUN 2018-2022**

Nama Mahasiswa : **Sasmika Dwi Suryanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2126021010**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 195908031986031003



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.I.P.
NIP. 197804302008121001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 196902191994032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Syarif Makhya, M.Si.




Sekretaris : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.



Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Direktor Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 5 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Studi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Sasmika Dwi Suryanto
NPM. 2126021010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sasmika Dwi Suryanto, lahir di Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 4 Januari 1976. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, anak dari pasangan Sarjono, A.Ma.Pd. (Alm.) dan Sukarmi. Pendidikan formal ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Bogo, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purbolinggo dan tamat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro di tahun 1994 pada Jurusan Ilmu Fisika. Penulis menempuh pendidikan Program Profesi Setara Diploma Satu Komputer Perbankan di LPK AKSMI Yogyakarta hingga tahun 1995 dan kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pemerintahan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 pada tahun 2000 dan mendapat penghargaan sebagai Lulusan Terbaik I Tingkat Fakultas.

Penulis melanjutkan pendidikan pasca sarjana pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Saat ini penulis merupakan Karyawan BUMN di PT Perkebunan Nusantara Group dan bertugas di PTPN I Regional 7 (sebelumnya PTPN VII) sebagai Kepala Bagian Manajemen Aset dan Pemasaran. Selain bekerja penulis juga mengikuti aktivitas organisasi karyawan sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII, Unsur Ketua di Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN I, Unsur Ketua di Federasi Serikat Perkebunan Nusantara (FSPBUN) dan juga menjadi Sekretaris di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perkebunan.

“ ... hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ...” (Q.S. Al Hasyr : 18)

Karya ini adalah dedikasi untuk orang tuaku, keluargaku dan siapapun yang mungkin dapat mengambil manfaat dari karya sederhana ini

PRAKATA

Alhamdulillahirrabbi 'Alamiin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik bagi umat pengikutnya.

Setelah melalui berbagai dinamika yang panjang tesis yang berjudul “Studi Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022” dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Atas selesainya penulisan Tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen Penguji Utama Tesis ini, yang telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga sejak proses.
5. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D., yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen pembimbing akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan

motivasi, arahan, dukungan dan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas motivasi, arahan dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Pejabat Struktural di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, atas ilmu, kebersamaan dan kekeluargaan yang membuat proses pendidikan yang penulis tempuh menjadi lebih ringan di tengah berbagai tantangan yang ada.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Magister Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas bantuan, pelayanan dan penyediaan fasilitas yang sangat membantu penulis menyelesaikan tugas-tugas diperkuliahan.
10. Bapak Abu Rosyid Istomi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mesuji, yang pada saat menjabat memberikan dukungan yang memudahkan penulis menyelesaikan penelitian untuk tesis ini.
11. Bapak Zulkifli, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji, yang saat ini telah berpindah tugas sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur atas kesediaan waktunya memberikan informasi-informasi yang sangat berguna bagi penulis dalam penelitian untuk penulisan tesis ini.
12. Seluruh Informan yang telah membantu dengan sukarela dalam menjawab pertanyaan ataupun memberikan keterangan dan pendapat yang sangat penting dalam penelitian untuk tesis ini.
13. Semua teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 dari semua konsentrasi : POLOTDA, MP, dan TKP atas kebersamaan dan motivasi untuk saling menguatkan menyelesaikan rangkaian tugas-tugas perkuliahan.
14. *Board of Region Management* PT Perkebunan Nusantara VII dan *Board of Region Management* PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 atas izin dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pasca Sarjana.

15. Tim Penulis di Sub Bagian Teknologi Informasi Kantor Direksi PTPN VII, Kebun Way Lima, Kantor Regional 7, khususnya di Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Bagian Manajemen Aset dan Manajemen atas dukungan, semangat dan pengertian yang diberikan kepada penulis.
16. Segenap atasan dan rekan kerja yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
17. Rekan-rekan pengurus SPPN VII, SPBUN PTPN I, FSPBUN dan LBH Perkebunan, PHBI Kantor Direksi atas pengertiannya kepada penulis ketika penulis harus memberikan perhatian yang lebih kepada aktivitas perkuliahan.
18. Para pengurus dan jama'ah Masjid Al Iman dan Al Hayyah atas do'a-do'a baiknya secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis menemukan berbagai kemudahan di tengah berbagai tantangan menyelesaikan aktivitas pendidikan.
19. *Last but not least*, keluarga penulis yang selalu menumbuhkan semangat dan harapan kepada penulis: Mamak; Almarhum Bapak; Ayah; Almarhum Emak; Istri dan anak-anakku : Laila Yusro, Alifah Hilmiya Az Zahra, Annissa Qurrotu Aini; Kakak dan Adik Penulis, Ipar, Keponakan, Sepupu dan semua keluarga besar. Do'a, harapan, kebersamaan dan perhatian memberikan motivasi yang membuat penulis tidak menyerah untuk menyelesaikan studi.

Terima kasih tak terhingga atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada semua yang telah penulis sebutkan di atas, dan juga semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses kuliah dan penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per satu. Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan kebaikan dari Alloh SWT.

Bandar Lampung, 14 Juni 2025

Sasmika Dwi Suryanto

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
PERRSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat akademis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Peningkatan dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia.....	9
2.2 Konsep Pembangunan dan Pembangunan Manusia.....	11
2.2.1 Pengertian Pembangunan	11
2.2.2 Teori Pembangunan Manusia (<i>Human Development Theory</i>)	13
2.3 Indeks Pembangunan Manusia (<i>Human Development Index</i>)	16
2.4 Kerangka Pikir	20

III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Informan Penelitian.....	29
3.6 Teknik Pengelolaan dan Pengolahan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
3.8 Teknik Keabsahan Data	36
IV. GAMBARAN UMUM.....	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji	42
1.1.1 Pembentukan, Lokasi Geografis dan Demografi	42
1.1.2 Perekonomian Daerah dan Sumber Pendapatan Utama	44
1.1.3 Kondisi Sektor Pembentuk IPM : Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Sektor Ekonomi di Kabupaten Mesuji.....	45
4.2 Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji	51
4.2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program.....	51
4.2.2 Tujuan dan Sasaran Program.....	52
4.2.3 Ruang Lingkup Program per Sektor dan Instansi Terkait	52
4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji	54
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Evaluasi Peningkatan IPM Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022	56
5.1.1 Perhitungan Pertumbuhan IPM Mesuji Tahun 2018-2022	57
5.1.2 Posisi Pertumbuhan IPM Mesuji Tahun 2018-2022 di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	58
5.1.3 Tren Pertumbuhan IPM Mesuji Tahun 2018-2022	71
5.2 Analisis Ketertinggalan IPM Kabupaten Mesuji	73
5.2.1 Analisis IPM Kabupaten Mesuji	73
5.2.2 Upaya-Upaya Peningkatan IPM Kabupaten Mesuji	86

5.2.3 Target dan Realisasi Pencapaian IPM Kabupaten Mesuji 2018-2022	89
5.2.4 Permasalahan Peningkatan IPM Kabupaten Mesuji	91
5.3 Implikasi Hasil Penelitian Dalam Pembangunan Manusia.....	114
VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI	116
6.1 Simpulan	116
6.2 Rekomendasi.....	118
6.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah Kabupaten Mesuji.....	118
6.2.2 Rekomendasi Pengembangan Penelitian Ilmiah.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Urutan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	4
Tabel 2. Persen Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	5
Tabel 3. Nilai Maksimum dan Minimum Dimensi IPM	18
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian.....	31
Tabel 5. Padanan Validitas Antara Metode Kualitatif dan Kuantitatif	39
Tabel 6. Teknik Keabsahan Data	39
Tabel 7. Kecamatan, Luas dan Penduduk di Kabupaten Mesuji 2021.....	43
Tabel 8. Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mesuji	46
Tabel 9. Data Sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2022	47
Tabel 10. Persentase PDRB Kabupaten Mesuji Berdasarkan Lapangan Usaha 2020-2022.....	49
Tabel 11. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Mesuji 2018-2021.....	50
Tabel 12. Ruang Lingkup Program per Sektor dan Instansi Terkait	53
Tabel 13. Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018-2022.....	59
Tabel 14. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Lampung 2018-2022	61
Tabel 15. Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung 2018-2022.....	65
Tabel 16. Harapan Lama Sekolah di Provinsi Lampung 2018-2022.....	66
Tabel 17. Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Lampung 2018-2022.....	68
Tabel 18. Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kabupaten Mesuji 2018- 2022	74
Tabel 19. RLS, HLS dan Indeks Pengetahuan 2018-2022.....	77
Tabel 20. Pengeluaran Per Kapita dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Mesuji 2018-2022.....	80
Tabel 21. Hasil Perhitungan Indeks Penyusun IPM Tahun 2022	83
Tabel 22. Simulasi IPM Kabupaten Mesuji tahun 2022	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	22
Gambar 2. <i>Interactive Model</i> Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	36
Gambar 3. Tren Peningkatan IPM Kabupaten Mesuji 2018-2022	72
Gambar 4. Target dan Realisasi IPM Kabupaten Mesuji 2018-2022	90
Gambar 5. Panjang Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Mesuji.....	106

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia akan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Manusia menjadi subyek yang sangat menentukan kemajuan suatu masyarakat. Bila kualitas sumber daya manusia baik, maka hal tersebut dapat menjadi modal besar untuk mencapai kemajuan suatu masyarakat atau negara. Terlebih jika sumber daya manusia yang berkualitas itu mempunyai jumlah yang besar. Seperti Indonesia misalnya, merupakan negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara, dan hal tersebut dapat menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia untuk pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar, kalau tidak dikelola secara baik maka dapat menimbulkan masalah tersendiri di kemudian hari (Marliana, 2022:87). Maka agar kualitas sumber daya manusia menjadi baik diperlukan langkah-langkah untuk membangun kualitas sumber daya manusia dimaksud.

Munculnya kesadaran akan peran penting sumber daya manusia terhadap suatu masyarakat, telah mendorong pemikiran-pemikiran untuk membangun kualitas manusia yang baik. Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia di suatu wilayah atau negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dianggap penting, berdampingan dengan indikator-indikator ekonomi maupun indikator fisik. Kesehatan, kesejahteraan ekonomi dan kualitas pendidikan yang merupakan bagian dari kualitas sumber daya manusia, menjadi komponen yang diukur dalam IPM.

IPM sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, mendapat perhatian dari berbagai pihak dan hal itu sejalan dengan pembaharuan konsep-konsep pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Bauer bahwa pembaharuan konsep-konsep pembangunan terus berjalan yang mengarah pada parameter dan indikator sosial yang mengusung jargon seberapa baik, bukan jargon seberapa banyak, tidak mengutamakan kualitas barang, namun lebih pada kualitas hidup (Purwoko, 2015:46). Latuconsina menyebutkan bahwa IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampak terhadap kondisi fisik (kesehatan dan kesejahteraan) maupun non-fisik (pendidikan) (Latuconsina, 2017:204). Ferawati juga menuliskan bahwa IPM adalah indikator untuk tolok ukur pembangunan manusia (Ferawati, 2018:146).

Berbagai pembangunan dalam konteks global, sejak tahun 2015 mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti: menjamin kehidupan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia serta meningkatkan kualitas pendidikan yang adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup (Hasibuan et al., 2020:140). Menurut Wiriana, pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasarnya adalah membangun manusia seutuhnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan *sustainable development goals* (SDGs) dan menjadi cerminan kesuksesan pembangunan oleh pemerintah, diukur dengan menggunakan IPM (Wiriana, 2018:1051).

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks harapan hidup, Indeks Pendidikan dan indeks standar hidup layak berlaku untuk semua negara yang memiliki data lengkap dari komponen-komponen tersebut, menjadi dasar klasifikasi suatu negara ke dalam negara maju (*developed country*), negara sedang berkembang (*developing country*), atau negara tidak maju (*underdeveloped country*). IPM dapat menjadi dasar untuk

mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia suatu negara atau daerah. Pengukuran IPM juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Bangun, 2021:47). Hal yang sama juga dituliskan oleh Mahuze et al. yang menyebutkan bahwa IPM menjadi indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk membuat klasifikasi apakah suatu negara tergolong negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang serta dapat juga untuk mengukur dampak atau pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Mahuze et al., 2022:2).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikelompokkan ke dalam klasifikasi atau kategori sebagai berikut:

- a. Rendah, untuk IPM kurang dari 60.
- b. Sedang, untuk IPM 60 sampai dengan kurang dari 70.
- c. Tinggi, untuk IPM 70 sampai dengan kurang dari 80.
- d. Sangat tinggi, untuk IPM 80 ke atas (BPS, 2021:6)

Desentralisasi pembangunan melalui otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia, memberikan harapan adanya peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan termasuk pembangunan manusia, sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan adanya otonomi daerah tersebut. Pada kenyataannya tidak semua daerah dapat menjalankan kewenangan yang dimiliki terkait dengan otonomi daerah secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Hal itu dapat dilihat pada tidak meratanya hasil pembangunan yang dilihat dari berbagai indikator, termasuk di dalamnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada daerah yang dapat dengan cepat meningkatkan IPM di wilayahnya meskipun belum lama terbentuk, namun ada daerah yang cenderung lambat dalam peningkatan IPM meskipun sudah lebih awal terbentuk sebagai daerah otonom dibandingkan dengan daerah lainnya. Ada daerah yang sejak awal telah mencapai IPM yang lebih

tinggi dari daerah lain dan cenderung terus bertahan pada posisi atas, ada daerah yang cenderung selalu berada pada posisi bawah.

IPM dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018 – 2022) secara berurutan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Urutan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Wil.	2018	Wil,	2019	Wil,	2020	Wil,	2021	Wil,	2022
BDL	76,63	BDL	77,33	BDL	77,44	BDL	77,58	BDL	78,01
MTR	76,22	MTR	76,77	MTR	77,19	MTR	77,49	MTR	77,89
LT	69,73	LT	70,04	PRS	70,30	PRS	70,45	PRS	70,98
PRS	69,42	PRS	69,97	LT	70,16	LT	70,23	LT	70,80
LTM	69,04	LTM	69,34	LTM	69,37	LTM	69,66	LTM	70,58
TB	67,70	TB	68,23	TB	68,52	TB	68,73	TB	69,53
LS	67,68	LS	68,22	LS	68,36	LS	68,49	LS	69,00
LU	67,17	LU	67,63	LB	67,80	LB	67,90	LB	68,39
LB	66,74	LB	67,50	LU	67,67	LU	67,89	LU	68,33
WK	66,63	WK	67,19	WK	67,44	WK	67,57	WK	68,04
TGM	65,67	TGM	66,37	TGM	66,42	TGM	66,65	TGM	67,22
TBB	65,30	TBB	65,93	TBB	65,97	TBB	66,22	TBB	67,13
PSW	64,97	PSW	65,75	PSW	65,79	PSW	66,14	PSW	66,70
PB	62,96	PB	63,79	PB	63,91	PB	64,30	PB	65,14
MSJ	62,88	MSJ	63,52	MSJ	63,63	MSJ	64,04	MSJ	64,94

Sumber : diolah oleh Peneliti dari data BPS Lampung

Keterangan singkatan:

Wil	: Wilayah	LU	: Lampung Utara
BDL	: Bandar Lampung	LB	: Lampung Barat
MTR	: Metro	WK	: Way Kanan
LT	: Lampung Tengah	TGM	: Tanggamus
PRS	: Pringsewu	TBB	: Tulang Bawang Barat
LTM	: Lampung Timur	PSW	: Pesawaran
TB	: Tulang Bawang	PB	: Pesisir Barat
LS	: Lampung Selatan	MSJ	: Mesuji

Dari data pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2018 – 2022 IPM Kabupaten Mesuji telah mengalami peningkatan dari 62,88 pada tahun 2018 menjadi 64,94 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut belum mengubah posisi IPM Mesuji selalu berada pada urutan paling bawah di antara

Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung. Dari tahun 2018 – 2022 IPM Mesuji masih berada pada kategori yang sama yaitu sedang (60 sampai dengan kurang dari 70). Ada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah berhasil mengubah kategori IPMnya dari sedang menjadi tinggi (70 sampai dengan kurang dari 80), yaitu : Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sedangkan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dari tahun 2018-2022 selalu berada pada kategori tinggi namun belum meningkat menjadi kategori sangat tinggi (80 ke atas). Dari data pada tabel 1 di atas, IPM Kabupaten Mesuji telah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum mengubah urutan IPM Mesuji di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung maupun kategorinya.

Pada sisi lain, Mesuji merupakan Kabupaten dengan persen penduduk miskin paling kecil atau terbaik di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Persen Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Wil.	2018	Wil,	2019	Wil,	2020	Wil,	2021	Wil,	2022
MSJ	7,55	MSJ	7,47	MSJ	7,33	MSJ	7,54	MSJ	6,84
TBB	8,1	TBB	7,75	TBB	7,39	TBB	8,32	TBB	7,44
BDL	9,04	MTR	8,68	MTR	8,47	MTR	8,93	MTR	7,87
MTR	9,14	BDL	8,71	BDL	8,81	BDL	9,11	BDL	8,21
TB	9,7	TBB	9,35	TBB	9,33	TBB	9,67	TBB	8,42
PRS	10,5	PRS	10,15	PRS	9,97	PRS	10,1	PRS	9,34
TGM	12,48	LT	12,03	TGM	11,68	TGM	11,8	LT	10,96
LT	12,62	TGM	12,05	LT	11,82	LT	12	TGM	10,98
WK	13,52	LB	12,92	LB	12,52	LB	12,8	LB	11,71
LB	13,54	WK	13,07	WK	12,9	WK	13,1	WK	11,76
LS	14,86	LS	14,31	LS	14,08	LS	14,2	LS	13,14
PB	14,98	PB	14,48	PS	14,29	PB	14,8	PB	13,84
LTM	15,76	PSW	15,19	LTM	14,62	LTM	15,1	PSW	13,85
PSW	15,97	LTM	15,24	PSW	14,76	PSW	15,1	LTM	13,98
LU	20,85	LU	19,9	LU	19,3	LU	19,6	LU	18,41

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari data BPS Lampung

Keterangan singkatan:

Wil	: Wilayah	LU	: Lampung Utara
BDL	: Bandar Lampung	LB	: Lampung Barat
MTR	: Metro	WK	: Way Kanan
LT	: Lampung Tengah	TGM	: Tanggamus
PRS	: Pringsewu	TBB	: Tulang Bawang Barat
LTM	: Lampung Timur	PSW	: Pesawaran
TB	: Tulang Bawang	PB	: Pesisir Barat
LS	: Lampung Selatan	MSJ	: Mesuji

Data yang menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan namun selalu berada pada urutan terbawah dalam capaian IPM, sementara persen penduduk miskin terendah yang menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, menjadi menarik untuk diamati. Hal tersebut memunculkan pertanyaan untuk mengetahui bagaimana peningkatan IPM Mesuji Tahun 2018-2022 dan mengapa IPM di Kabupaten Mesuji selalu berada di urutan paling bawah di antara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung.

Penelitian-penelitian yang lebih dahulu terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain adalah penelitian dengan judul, “Model Prioritas Pemerataan Pembangunan IPM di Provinsi Lampung Menggunakan Metode Analitic Hierachy Process” yang menyimpulkan bahwa prioritas pembangunan IPM di Provinsi Lampung secara berurut yaitu RLS (Rata-Rata Lama Sekolah), HLS (Harapan Lama Sekolah), PPK (Pengeluaran Per Kapita) dan AHH (Angka Harapan Hidup) (Susanto & Puspaningrum, 2020).

Penelitian sebelumnya, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013-2015” yang menemukan bahwa pendapat asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, yang bermakna jika pendapat asli daerah dan belanja modal tinggi maka indeks pembangunan manusia juga meningkat (Pratiwi & Nurdiawansyah, 2019).

Penelitian pada level nasional berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia” menghasilkan simpulan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif terhadap IPM, sedangkan kemiskinan tidak memiliki pengaruh positif terhadap IPM (Harahap, 2022).

Penelitian-penelitian tersebut lebih memfokuskan pada prioritas pemerataan, hubungan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM dengan metode penelitian kuantitatif. Bahasan dalam penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan ekonomi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan IPM serta menganalisis ketertinggalan IPM Kabupaten Mesuji melalui pendekatan kualitatif. Keterbaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini melihat pada aspek evaluasi hasil pembangunan, dalam hal ini IPM. Kajian dalam penelitian ini menggunakan perspektif manajemen pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022?
2. Mengapa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022 selalu berada di urutan terbawah di antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peningkatan IPM Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022.
2. Menganalisis ketertinggalan IPM Kabupaten Mesuji dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat akademis

Dalam ranah akademik, penelitian ini dapat memperkaya contoh terkait pencapaian hasil pembangunan manusia dan ketertinggalan IPM di suatu daerah dan keterkaitannya dengan kondisi spesifik di daerah tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji terkait terhadap peningkatan IPM dan strategi-strategi yang perlu dikembangkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peningkatan dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya) (KBBI, 2016:-). Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis atau menggambarkan jenjang yang berbeda. Dengan demikian peningkatan merupakan proses menuju tingkatan yang lebih baik. Dalam konteks peningkatan IPM, maka peningkatan dapat dipahami sebagai proses perubahan dari skor indeks tertentu menuju skor indeks yang lebih baik atau dari kategori tertentu menjadi kategori yang lebih baik. Peningkatan IPM dapat dilihat dalam aspek pertumbuhan yang menggambarkan ukuran perubahan dengan membandingkan capaian IPM pada waktu tertentu dengan waktu sebelumnya.

Nugroho et.al (2022:151) mengemukakan bahwa pertumbuhan IPM dapat dipahami sebagai ukuran yang dihitung untuk melihat perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk menggambarkan pertumbuhan IPM dalam suatu wilayah terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain: perhitungan pertumbuhannya; posisi atau perbandingan pertumbuhan IPM dengan wilayah lain yang setara atau berdekatan; tren pertumbuhannya. Dengan demikian untuk menganalisis peningkatan IPM di Kabupaten Mesuji, dapat digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pertumbuhan IPM
- b. Posisi Pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung.
- c. Tren Pertumbuhan IPM

Perhitungan pertumbuhan IPM yang dari tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM pada tahun t-1 (Nugroho et al., 2022:151).

Formulasi pertumbuhan tersebut digunakan untuk membandingkan capaian IPM tahun terkini dengan tahun sebelumnya. Namun bila tahun terkini yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya terpaut jarak waktu yang lebih dari satu tahun, maka formula tidak menggambarkan tingkat pertumbuhan tahunan (per tahun) dari jumlah tahun yang dibandingkan.

Untuk mengetahui pertumbuhan per tahun dalam beberapa tahun dapat digunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Tahunan} = \left[\left(\frac{f}{s} \right)^{1/y} - 1 \right] \times 100$$

f : final value (nilai akhir)

s : start value (nilai awal)

y : year (jumlah tahun = tahun akhir – tahun awal) (Lewis, 2023:3).

Dengan formulasi tersebut, maka bila disesuaikan dengan formulasi perhitungan IPM, formulasi tersebut menjadi:

$$\text{Pertumbuhan IPM per tahun} = \left[\left(\frac{IPM_t}{IPM_{t-1}} \right)^{1/y} - 1 \right] \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM pada tahun t (akhir)

IPM_{t-1} : IPM pada tahun t-1 (awal)

y : year (jumlah tahun = tahun terakhir – tahun awal)

2.2 Pembangunan dan Pembangunan Manusia

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan (*development*) secara umum dapat dipahami sebagai perubahan ke arah perkembangan pada suatu aspek tertentu. Makna pembangunan dapat dipahami secara luas tergantung pada perspektif dan sudut pandang orang yang melihatnya (Bangun, 2021:2). Nur Baeti (Fajri, 2021:213), mengartikan pembangunan sebagai suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nugroho dan Rochmin Dahuri (Digdowiseiso, 2019:6), mengartikan pembangunan sebagai sebuah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Bubaker F. Sheria, mendefinisikan pembangunan sebagai *an internal social process taking place within every country, where the basic requirements of the people are fulfilled by the wise and durable application of the country's resources. Economically, the definition of development suggests the nation's fulfillment of people's needs, employment, and the improvement of national wealth* (sebuah proses sosial internal yang terjadi di setiap negara, di mana kebutuhan dasar rakyat dipenuhi oleh penggunaan sumber daya negara yang bijaksana dan tahan lama. Secara ekonomi, pengertian pembangunan mengisyaratkan pemenuhan kebutuhan rakyat, lapangan kerja, dan peningkatan kekayaan nasional). (Shareia, 2015: 89).

Sedangkan pembangunan menurut Hasan dan Azis adalah serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep tertentu (Hasan & Azis, 2018:2). Hasan dan Azis juga mengemukakan bahwa secara terminologis, di

Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europianization*, bahkan sering disamakan dengan *term political change*. Indetifikasi dengan beberapa *term* tersebut disebabkan karena makna pembangunan bersifat *multi-interpretable*.

Berdasarkan penelusuran makna pembangunan secara kebahasaan, Hasan dan Azis menentukan nilai dasar dari konsep pembangunan sebagai berikut: pertama, pembangunan bermakna proses. Terdapat tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui pada saat pembangunan dilaksanakan. Kedua, pembangunan mengandung makna perubahan ke arah yang lebih baik. Ada penambahan nilai (*value*) dan manfaat (*utility*) dari obyek pembangunan, atau ada tujuan dan target tertentu dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, dalam pembangunan terdapat subyek yang melakukan pembangunan, metode atau rangkaian langkah yang menjadi panduan dan ada obyek atau sasaran pembangunan (Hasan & Azis, 2018:2-4).

Menurut Afandi et al, pembangunan dilaksanakan dengan gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional, yang meliputi upaya-upaya yang dimaksudkan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Jika pembangunan tidak disertai dengan etika maka akan mengakibatkan kekerasan dan sikap tidak peduli terhadap kepentingan manusia secara umum, termasuk terhadap alam/lingkungan. Pembangunan tidak hanya bisa berfokus pada sektor ekonomi, karena jika hanya fokus pada sektor ekonomi maka pembangunan tidak akan memberi nilai bagi kedudukan manusia. (S. A. Afandi et al., 2022:1-2).

Dari pengertian pembangunan sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan upaya atau langkah yang terkoordinasi, sah secara hukum, untuk memenuhi aspirasi masyarakat

secara manusiawi, dilakukan pada berbagai bidang, untuk menghasilkan perkembangan atau perubahan untuk menuju kondisi masyarakat suatu kawasan atau negara yang lebih baik, yang di dalamnya ada subyek, metode dan obyek atau sasaran yang ditetapkan.

2.2.2 Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*)

United National Development Programe (UNDP) mengartikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk menentukan dan memperluas pilihan-pilihan manusia. Pilihan-pilihan dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui proses pembanguan dari berbagai aspek seperti pembangunan sarana dan prasarana yang relevan. Hal ini sejalan dengan pemikiran baru tentang pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus atau pusat pembangunan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan dan menyesuaikannya dengan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Dalam proses pembangunan akan dibutuhkan kualitas dan kuantitas manusia yang sangat berkaitan dengan pembangunan manusia. Pembangunan manusia diharapkan dapat memperbaiki kualitas kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara (Bangun, 2021:46).

Nurkholis menyatakan bahwa teori pembangunan manusia (*human development theory*) dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita (Nurkholis, 2016:8). Menurut UNDP (Nurkholis, 2016:8), pendapatan rata-rata tidak dapat menggambarkan kondisi sumberdaya manusia di suatu wilayah dengan detail dikarenakan kesenjangan yang cenderung tinggi antara penduduk kaya dan miskin. Angka rata-rata membuat penduduk miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi. *Human development*

dimunculkan guna memperbaiki pengukuran dimaksud. Premis dasar *human development* adalah:

1. Pembangunan harus menjadikan penduduk sebagai pusat perhatian utama.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperluas pilihan-pilihan penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan. Karenanya, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya berfokus pada aspek ekonomi.
3. Pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan upaya peningkatan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga upaya untuk memanfaatkan kemampuan manusia dengan optimal.
4. Pembangunan manusia ditopang oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia merupakan dasar untuk menentukan tujuan pembangunan dan landasan dalam menganalisis pilihan-pilihan mencapainya (Nurkholis, 2016:8-6).

Mengacu kepada pengertian pembangunan manusia dari UNDP, Widodo dkk, menuliskan bahwa pembangunan manusia sebagai suatu proses dalam perluasan pilihan kepada masyarakat dilakukan melalui beragam upaya pemberdayaan yang mempunyai tujuan utama meningkatkan kemampuan dasar manusia sepenuhnya supaya dapat berpartisipasi di semua bidang pembangunan demi kepentingan masyarakatnya. Pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator dari kemajuan suatu negara, di mana negara dinyatakan maju tidak hanya dihitung dari pendapatan domestik brutonya saja, namun juga melingkupi aspek harapan hidup serta pendidikan dan kesehatan masyarakatnya juga dihitung (Rahmat & Bachtiar, 2018:1).

Pembangunan manusia itu sendiri adalah sebuah paradigma pembangunan di mana manusia ditempatkan sebagai subyek dari

kegiatan ekonomi. Fokus dan sasaran pembangunan adalah capaian penguasaan atas sumber daya manusia guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup yang layak sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi tujuan akhir segala macam pembangunan (Arafat & Rindayati, 2018:141). Desrianda, mengutip Todaro dan Smith, menuliskan bahwa pembangunan sumber daya manusia, mempunyai arti peningkatan kemampuan dasar masyarakat yang dapat meningkatkan peluang berpartisipasi pada sebuah proses pembangunan (Harahap, 2022:3).

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan hasil yaitu proses memperbesar pilihan manusia tetapi juga menjadi tujuan. Pembangunan manusia membawa implikasi bahwa orang harus mempengaruhi proses yang membentuk kehidupan mereka. Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan kemampuan manusia, melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses yang mempengaruhi pada pembentukan dan perbaikan masyarakat dan kehidupannya. Perkembangan manusia adalah berkaitan dengan bagaimana memperoleh lebih banyak kemampuan dan menikmati lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan tersebut. Dengan kemampuan dan kesempatan lebih, orang memiliki lebih banyak pilihan, dan memperluas pilihan merupakan inti dari pendekatan pembangunan manusia. Perkembangan manusia juga sebuah proses yang tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, terkait dengan keamanan manusia. Dan tujuan utamanya adalah untuk memperbesar kebebasan manusia (Yektiningsih, 2018:33).

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia merupakan proses dan tujuan untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, di mana kemampuan dan kesempatan sumber daya manusia ditingkatkan

agar dapat berperan aktif dalam proses perbaikan kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

Bangun, menuliskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (*human development index/HDI*) mendefinisikan kesejahteraan manusia tidak sekedar terbatas pada pendapatan domestik bruto (PDB) tetapi meliputi arti yang lebih luas. Indeks Pembangunan Manusia telah diterbitkan dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) sejak tahun 1990. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran dengan membandingkan tiga komponen, yaitu: (1) harapan hidup, (2) melek huruf dan pendidikan, dan (3) standar hidup. Ketiga komponen itu dihitung rata-rata sederhana untuk mengetahui indeks harapan hidup, Indeks Pendidikan dan indeks standar hidup layak (Bangun, 2021:47).

Dalam *Human Development Report*, pembangunan manusia diartikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang memperluas pilihan-pilihan masyarakat atau yang meningkatkan aspek-aspek kehidupannya. Aspek-aspek kehidupan yang penting ini dilihat dari usia panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, serta standar hidup layak (Setiawan & Hakim, 2013:18).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indeks yang dinilai berdasarkan kemampuan masyarakat untuk menjaga kesehatan, kemampuan masyarakat mendapatkan pendidikan tinggi, dan keterampilan untuk meraih pendapatan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam hidup yang layak (Pratiwi & Nurdiawansyah, 2019:100). Himo et al, menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai terobosan dalam melakukan evaluasi pembangunan manusia. (Himo et al., 2022:125).

Menurut Nur Baeti (Fajri, 2021:213), IPM digunakan sebagai alat untuk mengukur besarnya dampak yang berhasil ditimbulkan dari upaya meningkatkan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia menjadi satu komponen pembangunan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan titik berat pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan manusia ini dihitung dengan ukuran besar atau kecilnya angka pendidikan, kesehatan serta daya beli. Semakin tinggi angka yang dihasilkan, maka berarti tujuan dari pembangunan semakin tercapai.

Yogi et al. menuliskan bahwa sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu panjang umur dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan layak yang diukur dengan beberapa indikator yaitu: angka harapan hidup saat lahir (dimensi umur panjang dan hidup sehat; lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (dimensi pengetahuan); dan daya beli (*Purchasing Power Parity*) yang mewakili dimensi standar hidup layak. Kemampuan daya beli dapat dilihat dari pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang memiliki capaian pembangunan untuk hidup layak (Yogi et al., 2018:38). Tri Wahyuningsih menuliskan bahwa ada tiga komponen IPM yaitu: kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan) (Wahyuningsih, 2019:300).

Nugroho menuliskan bahwa sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi-dimensi itu mempunyai pengertian yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan menggunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan gabungan dari indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian, dimensi standar hidup layak diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan

pokok, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita. Pengeluaran riil per kapita ini menjadi pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak (Nugroho et al., 2022:147).

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) sebagai indikator untuk mengukur dimensi panjang umur dan hidup sehat, merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator yang digunakan untuk dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Rata-rata lama sekolah adalah gambaran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun di masa mendatang. Kemudian, Dimensi standar hidup layak yang menggambarkan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi, diukur oleh UNDP dengan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Sedangkan BPS, dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (Nugroho et al., 2022:147-148).

Untuk menghitung indeks masing-masing dimensi IPM digunakan batas maksimum dan minimum sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. Nilai Maksimum dan Minimum Dimensi IPM

Indikator Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan	Rupiah	1.007.436*	26.572.352**

Sumber : Nugroho et al. (2022:150)

Keterangan:

- * : Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** : Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Jakarta Selatan tahun 2025

Nilai maksimum dan minimum sebagaimana dalam tabel 2 tersebut di atas, menjadi acuan untuk menghitung indikator komponen IPM dengan formula sebagai berikut:

1. Indeks Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Indeks umur harapan hidup saat lahir (UHH) didapatkan dengan perhitungan angka harapan hidup (AHH), angka harapan hidup minimum (AHH_{min}) dan angka harapan hidup maksimum (AHH_{maks}) dengan formula:

$$I_{UHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Indeks Pengetahuan

Indeks Pengetahuan adalah rata-rata dari indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS). HLS dan RLS masing-masing dihitung dengan menggunakan nilai minimum dan maksimum melalui formulasi:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

3. Indeks Pengeluaran

Standar hidup layak diukur dengan Indeks Pengeluaran dihitung berdasarkan logaritma natural pengeluaran, pengeluaran minimum dan pengeluaran maksimum dengan formulasi menggunakan perhitungan logaritma normal sebagai berikut:

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran}) - \ln(\text{Pengeluaran min})}{\ln(\text{Pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Setelah perhitungan indeks dari masing-masing indikator komponen IPM tersebut di atas, maka IPM dihitung rata-rata ukur (geometrik) dari tiga indeks dimensi dengan formula sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

(Nugroho et al., 2022:150).

2.4 Kerangka Pikir

Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho et al (Nugroho et al., 2022:151) bahwa pertumbuhan IPM merupakan ukuran peningkatan IPM yang dihitung untuk melihat perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Analisis terhadap pertumbuhan IPM dilakukan agar dapat memberikan gambaran tentang besaran peningkatannya, bagaimana posisi pertumbuhan IPM tersebut dibandingkan wilayah lain yang setara, dan tren pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2021 meliputi tiga aspek yaitu: perhitungan pertumbuhan IPM, posisi pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji terhadap IPM Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung dan tren pertumbuhan IPM dimaksud.

Peningkatan IPM tidak dapat dilepaskan dari komponen-komponen pembentuk IPM tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep dan pengukuran komponen IPM yang merujuk pada HDI (*Human Development Indeks*) sebagai upaya terbaru dalam menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi, baik di Negara Sedang Berkembang (NSB) maupun negara maju yang dilakukan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1990. Ada tiga komponen IPM yaitu: kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan

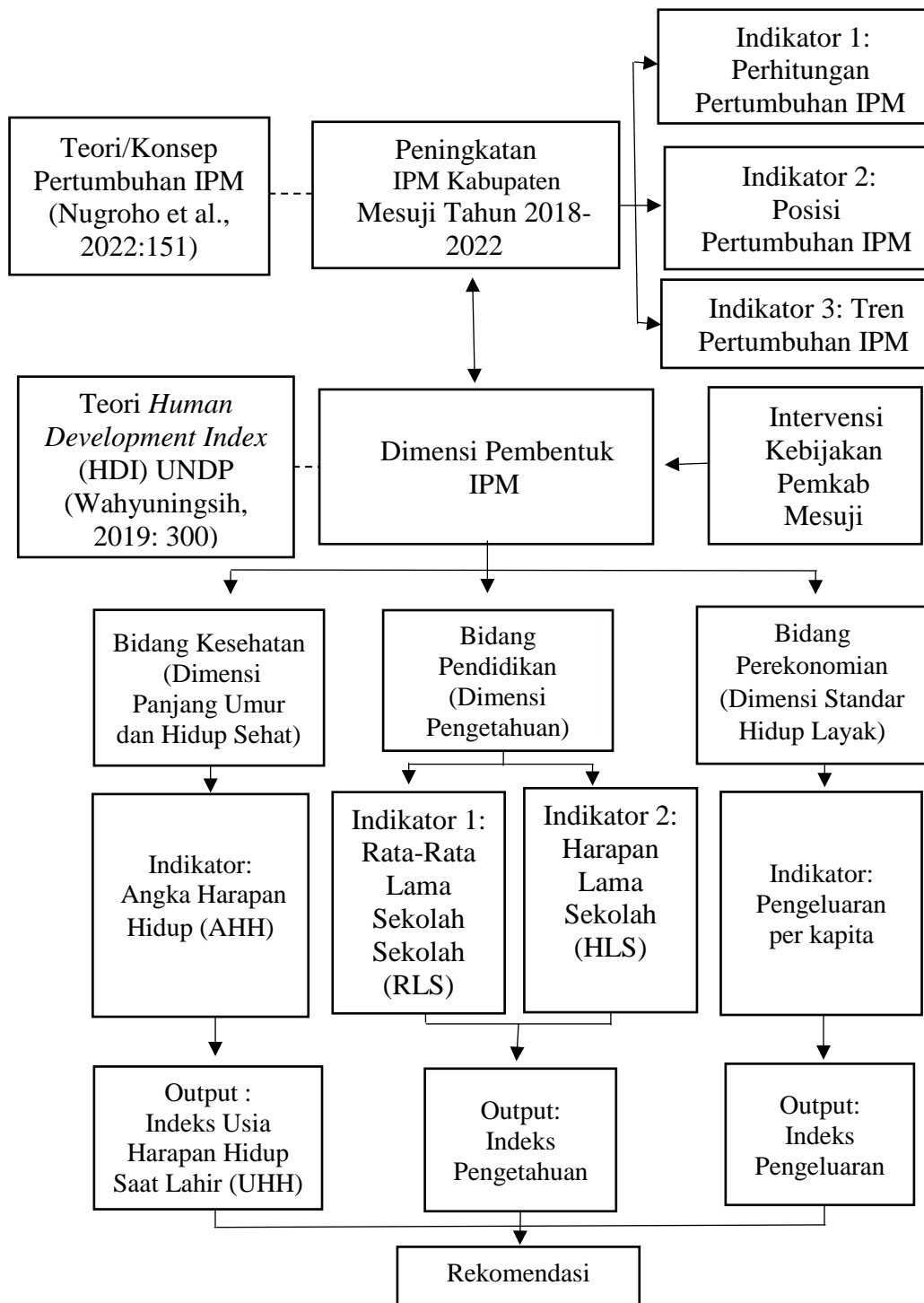
standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan) (Wahyuningsih, 2019: 300).

Tiga komponen IPM dimaksud, diterapkan dalam perhitungan IPM di Indonesia sebagai adopsi dari *Human Development Index* (HDI) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat digunakan umur harapan hidup saat lahir (UHH) atau dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak (Nugroho et al., 2022:147-148).

Analisis terhadap indeks-indeks yang diperoleh Kabupaten Mesuji dari dimensi-dimensi IPM akan dapat memberi jawaban mengapa capaian IPM Kabupaten Mesuji selalu terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung dalam lima tahun (2018-2022) yang merupakan satu periode RJPMMD.

Dalam menganalisis IPM sebagai hasil dari proses pembangunan yang dilakukan oleh negara, perlu melihat intervensi dari pemerintah, dalam hal Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap ketiga dimensi atau komponen pembentuk IPM tersebut. Dari evaluasi peningkatan IPM dan analisis terhadap dimensi atau komponen pembentuk IPM Kabupaten Mesuji, akan didapatkan simpulan yang dapat menjadi bahan untuk penyusunan strategi peningkatan IPM meliputi bidang-bidang yang menjadi dimensi dari IPM yaitu: bidang

kesehatan, bidang pendidikan dan bidang perekonomian. Secara ringkas kerangka pikir digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Leedy dan Ormod (Sarosa, 2021:7), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berfokus pada fenomena yang diteliti pada tatanan alamiahnya dan peneliti melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut secara menyeluruh dengan segala kompleksitasnya. Menurut Cresswell (Sarosa, 2021:7), kualitatif adalah penelitian yang mempelajari permasalahan manusia baik secara individu maupun kelompok dan cara mereka memaknainya menggunakan asumsi dan kerangka teori *interpretative*. C. Marshal dan Rossman (Sarosa, 2021:7) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tatanan dilakukan pada alamiah yang menggunakan berbagai metode yang manusia berfokus pada konteks fenomena, berkembang, dan secara mendasar menganut paham *interpretative*.

Moleang (Ikbar, 2014:146) menjabarkan sebelas karakteristik penelitian dengan metode penelitian pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrument utama, menggunakan metode kualitatif untuk menjaring data (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen), menganalisis secara induktif, teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri untuk memvalidasi data (triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci dan sebagainya), menggunakan desain sementara (yang dapat

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dengan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi (Satori & Komariah, 2020:32).

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan prosedur ilmiah untuk pengumpulan dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan menginterpretasikan data melalui kata-kata.

3.2 Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Penetapan fokus penelitian berarti melakukan pembatasan kajian. Penetapan fokus penelitian dapat diartikan melakukan penetapan kriteria data penelitian. Fokus masalah menjadi pedoman dari peneliti dalam menetapkan data yang harus dicari. Dengan fokus penelitian, maka data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dapat direduksi oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif dapat terjadi penetapan fokus penelitian baru dilakukan dan dipastikan pada saat peneliti berada di lapangan (Abdussamad, 2021:105). Ikbar menuliskan bahwa fokus sangat penting karena tidak ada penelitian tanpa fokus, di mana sifat fokus penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dilaksanakan. Fokus dalam penelitian kualitatif masih dapat berubah (Ikbar, 2014:185-1866).

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji serta apa yang menyebabkan Kabupaten Mesuji sulit untuk mengubah peringkat dalam capaian IPM.

Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Analisis peningkatan IPM Kabupaten Mesuji untuk melihat bagaimana peningkatan IPM dalam kurun waktu 2018-2022. Peningkatan IPM dilihat dari pertumbuhan IPM, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho et al. (2022:151) bahwa pertumbuhan IPM menggambarkan ukuran peningkatan yang dihitung untuk melihat perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk menganalisis pertumbuhan IPM tersebut, maka indikator yang digunakan adalah:
 - a. Perhitungan Pertumbuhan IPM
 - b. Posisi Pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung.
 - c. Tren Pertumbuhan IPM

2. Analisis dimensi-dimensi IPM Kabupaten Mesuji untuk melihat mengapa IPM Kabupaten Mesuji selalu berada dalam posisi terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Dari analisis ini akan dihasilkan rekomendasi mengenai strategi yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka upaya peningkatan IPM Kabupaten Mesuji. Dimensi-dimensi yang dianalisis mengacu kepada dimensi dari *Human Development Index* yang telah diterjemahkan/disesuaikan oleh BPS (Wahyuningsih, 2019: 300). Indikator dari dimensi-dimensi IPM ini adalah :
 - a. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup Saat Lahir (AHH/UHH).
 - b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
 - c. Pengeluaran Per Kapita.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti secara langsung atau petugas lapangan yang ditunjuk atau enumerator. Data primer disebut juga data langsung, data asli atau data terbaru (saat penelitian dilakukan). Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti, orang yang ditugaskan atau enumerator yang terlibat dalam satu penelitian tertentu bersumber dari informasi atau data-data yang telah ada sebelumnya (Unas, 2020:17).

Ikbar membedakan sumber data atau sumber informasi ke dalam : sumber-sumber lapangan dan sumber-sumber dokumenter. Sumber informasi lapangan antara lain adalah pengetahuan penulis atau peneliti yang memiliki pengetahuan lengkap mengenai suatu peristiwa sosial atau kedekatan dengan kelompok masyarakat dan kondisi tertentu. Sumber informasi dokumenter dibedakan dalam sumber dokumenter primer dan sumber dokumenter sekunder. Sumber dokumenter primer memberikan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri dan selanjutnya disiarkan langsung dan datanya bersifat orisinal. Sedangkan sumber informasi dokumenter sekunder memberi informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya dan dibuat fotokopi-fotokopinya (Ikbar, 2014:156).

Sumber data primer dari penelitian ini antara lain didapatkan dari narasumber atau informan. Data primer antara lain berupa hasil wawancara atau diskusi maupun bila ada dokumen-dokumen yang bersifat primer. Sedangkan data sekunder bersumber dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik, arsip atau dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mesuji serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

Dokumen-dokumen yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data resmi karena berasal dari badan atau lembaga resmi. Dokumen resmi adalah dokumen dari sumber-sumber primer maupun sekunder yang dibuat atau dikumpulkan oleh badan-badan resmi (Ikbar, 2014:156). Selain menggunakan data kualitatif seperti hasil wawancara atau diskusi, penelitian ini juga menggunakan data statistik. Data statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan masalah tertentu (Unas, 2020:5).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting. Ketepatan teknik pengumpulan data akan mempengaruhi kualitas data yang didapatkan dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Satori dan Komariah menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data (dalam penelitian kualitatif) bisa dilakukan melalui observasi partisipasi (*Participant Observer*), wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*), dokumentasi atau gabungan dari keempatnya (Satori & Komariah, 2020:182).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara memperoleh informasi bukan melalui orang sebagai narasumber, tetapi dari macam-macam sumber tertulis dari dokumen yang ada pada informan. Dokumen secara umum dapat dibedakan dalam dokumen resmi dan tidak resmi. Dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur, namun pada moment tertentu (studi

literatur) literatur bisa menjadi dokumen (Satori & Komariah, 2020:186, 190).

Pada penelitian ini pengumpulan data melalui dokumentasi antara lain meliputi dokumen perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan terkait IPM dari instansi terkait di Kabupaten Mesuji maupun data-data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

2. Wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian kualitatif sifat wawancara mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan (Satori & Komariah, 2020:163).

Tipe wawancara meliputi: wawancara terstruktur (menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara); wawancara tidak terstruktur (informal, tidak ada panduan atau daftar pertanyaan, di mana pewawancara harus memiliki tujuan dan topik yang jelas agar isi wawancara tidak terlalu jauh menyimpang); wawancara semi terstruktur, di mana pewawancara sudah menyiapkan daftar panduan wawancara namun pada pelaksanaannya wawancara menelusuri lebih jauh suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan partisipan (Sarosa, 2021:22-24).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tipe semi terstruktur di mana sebelumnya dibuat panduan untuk mengarahkan topik bahasan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian namun dapat dikembangkan lebih jauh dan tidak dilaksanakan dengan urutan yang kaku.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD merupakan bentuk khusus wawancara yang didefinisikan sebagai interaksi dan kerjasama sekelompok kecil partisipan yang bersifat formal dan berjangka temporer untuk mendalami suatu topik (Sarosa, 2021:24-25).

FGD dalam penelitian ini dilakukan dengan menginteraksikan pihak Pemerintah Kabupaten Mesuji yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, yang lebih terkait dengan perumusan dan strategi kebijakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial yang lebih terkait dengan implementasi kebijakan; serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji sebagai pihak independent yang melakukan survey atau penelitian tentang capaian IPM Kabupaten Mesuji. Melalui interaksi dari pihak-pihak tersebut, diharapkan akan didapatkan data yang lebih komprehensif di mana masing-masing pihak dapat saling melengkapi, menguatkan, menyanggah atau mengkonfirmasi jawaban antar peserta diskusi.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian, sampel atau responden dikenal dengan istilah informan. Pada penelitian kualitatif, pemilihan sampel berbeda dengan penelitian kuantitatif. Keterwakilan populasi tidak menjadi fokus utama sehingga keacakan (*randomness*) tidak dijadikan pertimbangan. Prioritas pemilihan sampel adalah dengan pertimbangan pada pihak yang diduga atau diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan penelitian (*purposive*) (Sarosa, 2021:17). Menurut Milles dan Huberman (Satori & Komariah, 2020:65-66) menyebutkan bahwa sampel kualitatif mempunyai kecenderungan antara lain: menggunakan orang yang lebih kecil jumlahnya; bersifat *purposive* karena proses sosial memiliki suatu

logika dan perpaduan; dapat berubah dengan munculnya pilihan informan-informan baru sebagai perbandingan atau untuk menemukan hubungan; berupa usaha menemukan keseragaman dan sifat umum yang dilakukan terus dan berulang melalui cara mempertentangkan, mereplikasikan, menyusun katalog dan mengklasifikasi obyek penelitian; penarikan sampel terkait dengan kehandalan menggeneralisasi dalam hubungannya dengan kelompok orang yang lebih luas, peristiwa, latar atau proses yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Informan dalam penelitian ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi-informasi untuk menguatkan data yang didapatkan melalui teknik dokumentasi. Informan penelitian ini adalah pihak dari Pemerintah Kabupaten Mesuji (BAPPELITBANGDA; Dinas Terkait) dan BPS Kabupaten Mesuji, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Asal Informan	Informan	Metode
1.	Indra Kusuma Wijaya	Sekretariat Daerah	▪ Asisten II Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	FGD
2.	Andri Jasman		▪ Kepala Bagian Kesejahteraan	FGD
3.	Sakhroni		▪ Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	FGD
4.	Abu Rosyid Istomi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	▪ FGD ▪ Wawancara
5.	Najamudin Fikri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	FGD
6.	Suwantoro	Dinas Sosial	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	FGD
7.	Dahuri Santoni	Dinas Pertanian	Sekretaris Dinas Pertanian	FGD
8.	Hamzah Saifudin	Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji	Staf BPS Kabupaten Mesuji	FGD
9.	Zulkifli	Kabupaten Mesuji	Kepala BPS Kabupaten Mesuji	Wawancara
10.	Rakhmi Pratiwi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	FGD
11.	Kusnandar	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	FGD

Sumber : Hasil FGD dan Wawancara

Informan dari beberapa instansi tersebut dalam tabel di atas, ditujukan untuk mendapatkan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informan dari Sekretariat Daerah diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan arah kebijakan peningkatan IPM Kabupaten Mesuji.

2. Informan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan perumusan dan evaluasi program/kebijakan peningkatan IPM.
3. Informan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi program terkait dengan dimensi IPM (kesejahteraan/hidup layak: kesempatan bekerja).
4. Informan dari Dinas Sosial berhubungan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi program terkait dengan dimensi IPM (kesejahteraan/hidup layak : perlindungan sosial).
5. Informan dari Dinas Pertanian mengenai informasi yang terkait dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi program terkait dengan dimensi IPM (perekonomian: usaha pertanian).
6. Informan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji lebih banyak berkaitan dengan penjelasan data-data dan perhitungan terkait IPM Kabupaten Mesuji.
7. Informan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhubungan dengan informasi mengenai perencanaan, implementasi dan evaluasi program terkait dengan dimensi IPM (Indeks Pengetahuan: harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah).
8. Informan dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi program terkait dengan dimensi IPM (Indeks Kesehatan : angka harapan hidup).

3.6 Teknik Pengelolaan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Michael D. Mayers (Sarosa, 2021:34), ide dasar pengelolaan data kualitatif adalah mereduksi dan menata data kualitatif ke dalam satuan-satuan yang mudah untuk dianalisis. Sedangkan hal utama yang perlu mendapat perhatian dari peneliti dalam pengelolaan data menurut Milles et al. (Sarosa, 2021:34) adalah: data dapat diakses dengan mudah serta terjamin kualitasnya; terdapat dokumentasi mengenai analisis apa saja yang

telah dilakukan terhadap data; penyimpanan data dan analisis terkait setelah penelitian selesai.

Pengelolaan data penelitian kualitatif menurut Sarosa meliputi langkah-langkah sebagai berikut: pembuatan daftar data yang diperlukan; pengumpulan dan pengelompokan data (data mentah/asli, data yang telah diproses sebagian, data yang telah diolah, kode, memo dan sebagainya), dalam hal ini data yang dikelompokkan diberi nama dan keterangan yang jelas agar mudah dicari; digitalisasi dokumen tercetak; pengelolaan keamanan dan ketersediaan data (Sarosa, 2021:35).

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara simultan. Pengolahan data lebih mengarah kepada penyiapan atau penyajian data agar siap untuk dianalisis. Abdussamad mengemukakan bahwa analisis data kualitatif meliputi pengolahan dan pemaknaan data, dimulai sejak peneliti memasuki lapangan. Kemudian hal tersebut dilakukan juga secara kontinyu pada waktu pengumpulan data sampai dengan akhir kegiatan pengumpulan data yang dilakukan berulang hingga data jenuh (tidak didapatkan lagi informasi baru). Aktivitas dimaksud akan berkembang, berubah, dan bergeser sesuai perkembangan dan perubahan data yang ditemukan di lapangan (Abdussamad, 2021:105). Jadi pengolahan data itu sendiri merupakan bagian dari analisis data sebelum dilakukan pemaknaan data.

Menurut Satori dan Komariah, pengolahan data dalam penelitian kualitatif meliputi kegiatan reduksi data dan penyajian data. Reduksi data dilakukan dengan identifikasi terhadap bagian terkecil dari data yang mempunyai makna jika dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Setelahnya dilakukan pengkodean agar bagian tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan terperinci, kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok yang penting. Display atau penyajian data dilakukan dengan memilah bagian-bagian data yang memiliki kesamaan dan diberi label atau nama. Data dikategorikan berdasarkan pokok permasalahan

dan dibuat matriks sehingga memudahkan untuk melihat pola hubungan satu data dengan data lainnya. Setiap kategori yang ada dicari kaitannya kemudian diberi label (Satori & Komariah, 2020:121-122).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif prosesnya dilakukan berkesinambungan sejak sebelum memasuki lapangan (studi pendahuluan), memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan (Satori & Komariah, 2020:270). Nasution (Satori & Komariah, 2020:270) mengemukakan bahwa proses analisis sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum melaksanakan penelitian hingga penulisan hasil penelitian. Namun yang lebih berat dan terfokus adalah menganalisis data selama proses di lapangan bersamaan proses mengumpulkan data.

Miles dan Huberman (Satori & Komariah, 2020:274) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Aktivitas tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Penjelasan dari aktivitas analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data reduction dilakukan untuk merangkum data yang sebelumnya diperoleh peneliti dalam jumlah yang banyak, beragam dan bahkan sangat rumit. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, kemudian direduksi, dirangkum dengan memilih hal-hal pokok yang penting. Hasil ikhtisar dan pemilahan data berdasarkan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan memudahkan mencari kembali data sebagai tambahan data

yang didapatkan sebelumnya bila dibutuhkan. Karena tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah adanya temuan, maka apabila ditemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, justru hal tersebut harus menjadi perhatian dalam proses reduksi data. Proses reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang membutuhkan kemampuan yang tinggi, sehingga diperlukan dapat mendiskusikan dengan pihak lain yang dipandang ahli atau dapat membantu memberikan pandangannya sehingga memperluas wawasan peneliti. Proses reduksi data diharapkan dapat memilah data-data yang memiliki temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian data (*data display*)

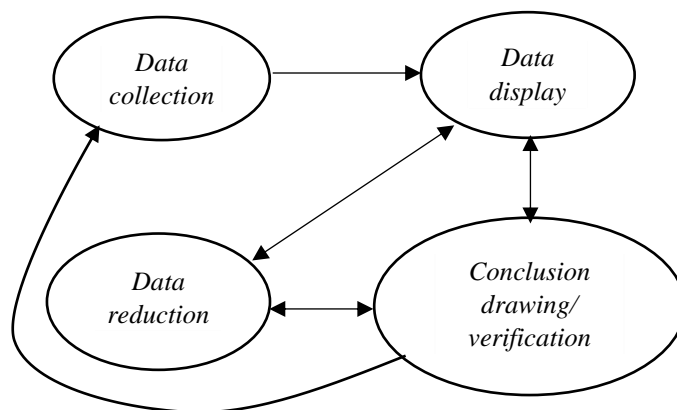
Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan melalui tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data dapat juga dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Satori & Komariah, 2020:275) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah teks naratif : “*the most frequent form of display data qualitative research in the past has been narrative text*”. Fungsi dari penyajian data adalah memudahkan dan memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Indikator bahwa peneliti memahami apa yang disajikan adalah apakah penulis memahami isi dari data yang disajikan tersebut.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Satori & Komariah, 2020:275). Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berubah bila pada tahap pengumpulan data tidak ditemukan bukti-bukti kuat

yang mendukung. Namun bila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan maka kesimpulan yang dibuat di awal merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal dan mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau *gambaran* suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Satori & Komariah, 2020:274-275).

Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. *Interactive Model* Dalam Analisis Data Kualitatif

Sumber : Miles dan Huberman (Satori & Komariah, 2020:273).

3.8 Teknik Keabsahan Data

Mengutip pendapat beberapa penulis, yaitu Patton; Seale & Silverman; A. Strauss & Corbin; Williamson, Sarosa mengemukakan bahwa untuk mencapai

kualitas yang baik, penelitian kualitatif perlu memiliki atribut dapat dipercaya (*trustworthiness*) yang tinggi. Untuk mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi, penelitian kualitatif perlu mengungkapkan proses dari temuannya dengan perincian yang memadai. Pengungkapan dengan lengkap dan terperinci dimaksudkan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian dan hasil-hasil temuannya, sehingga pembaca dapat menilai apakah proses penelitian dan hasil-hasilnya andal atau tidak. Pengungkapan yang rinci dan memadai dapat dilakukan jika penelitian mampu mengungkap kompleksitas dan perspektif berbeda dari suatu fenomena, sejalan dengan paradigma *constructivist* (Sarosa, 2021:14).

Satori dan Komariah (2020:204-208) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dapat dianggap abash bila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) yang secara singkat dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Keterpercayaan (*credibility/validitas internal*), yang merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Kredibilitas dapat ditingkatkan melalui beberapa cara antara lain:
 - Perjanjangan pengamatan (*prolonged engagement*) dengan harapan terjadi kedekatan hubungan antara peneliti dengan nara sumber sehingga narasumber semakin terbuka, tidak ada informasi yang disembunyikan dan peneliti memperoleh data secara lengkap.
 - Peningkatan keteguhan/kegigihan (*persistent observation*) yang dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.
 - Triangulasi (*triangulation*) yaitu pengecekan data dengan penggunaan metode, sumber data, waktu, teori, pihak pengumpul data yang berbeda-

beda. Dengan triangulasi diharapkan ada *cross check* terhadap hasil penelitian sehingga lebih dapat dipercaya.

- Diskusi dengan teman sejawat (*peer debriefing*), dilakukan bila penelitian dilakukan oleh tim, atau bisa juga dilakukan pertemuan sumber data dan dilakukan diskusi untuk mendapatkan data-data yang telah teruji.
 - *Member check*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh sumber data kepada peneliti.
- b. Keteralihan (*transferability*/validitas internal), yaitu bahwa hasil penelitian dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian. Transferabilitas yang tinggi didapatkan bila pembaca laporan penelitian mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai konteks dan fokus penelitian. Cara untuk meningkatkan transferabilitas antara lain dengan memberikan uraian dengan rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya dalam pembuatan laporan.
- c. Ketergantungan (*dependability*/realibilitas) yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Uji dependabilitas dilakukan dengan uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang diambil apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak. Kalau penelitian tidak dilakukan dan datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk memenuhi *dependability* dilakukan dengan cara: menyusun catatan lapangan, deskripsi data, analisis, sintetis dan tafsiran/pemaknaan, serta melaporkan proses pengumpulan data.
- d. Kepastian (*conformability*/obyektivitas), yaitu terkait dengan obyektivitas. Penelitian mempunyai derajat obyektivitas yang tinggi jika keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *comformability* hampir sama dengan uji *dependability* sehingga dapat dilakukan bersamaan. Uji yang dilakukan adalah *audit trail* (penelusuran jejak) artinya jejak yang dapat dilacak atau diikuti. Audit

dilakukan dengan pemeriksaan terhadap ketelitian dalam setiap proses penelitian sehingga timbul keyakinan bahwa hasil yang dilaporkan demikian adanya.

Denzim dan Lincoln (Ikbar, 2014 : 56) memadankan keabsahan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dengan tabel berikut:

Tabel 5. Padanan Validitas Antara Metode Kualitatif dan Kuantitatif

Kualitatif		Kuantitatif
<i>Credibility</i>	Berpadan dengan	Validitas Internal
<i>Transferability</i>	Berpadan dengan	Validitas Eksternal
<i>Dependability</i>	Berpadan dengan	Reliabilitas/Keajegan
<i>Conformability</i>	Berpadan dengan	Obyektivitas

Sumber : Agus Salim (Ikbar, 2014 : 56)

Sebagai upaya pemenuhan keabsahan, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

Tabel 6. Teknik Keabsahan Data

Jenis Keabsahan	Teknik Keabsahan Data
<i>Credibility</i>	Trianggulasi : Sumber dan teknik
<i>Transferability</i>	Pembuatan laporan dengan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya
<i>Dependability</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat catatan hasil penelitian, mendeskripsikan, menganalisis dan melakukan pemaknaan data
<i>Conformability</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendokumentasikan proses pengumpulan data

Sumber : diolah oleh Peneliti

Penelitian ini mengutamakan penggunaan triangulasi untuk memperoleh kredibilitas data karena triangulasi merupakan teknik yang lazim digunakan di berbagai penelitian kualitatif. Selain itu dalam triangulasi sekaligus terjadi *cross check* data dari sumber atau metode yang berbeda.

Istilah triangulasi diambil dari istilah navigasi yang menggunakan minimal tiga referensi untuk menggunakan posisi geografis. Awalnya, triangulasi dalam penelitian kualitatif didefinisikan oleh Denim (Sarosa, 2021:95-96) sebagai penggunaan berbagai metodologi guna meneliti suatu fenomena yang sama. Triangulasi dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh bias pribadi peneliti karena hanya menggunakan satu metodologi dalam penelitiannya. Denzin (Sarosa, 2021:95-96) kemudian menjelaskan jenis triangulasi meliputi:

- a. Triangulasi data, yang diartikan dengan mengumpulkan dan menggunakan data dari beberapa sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi peneliti yaitu pengumpulan data melalui orang yang bukan peneliti.
- c. Triangulasi teori, yaitu menggunakan lebih dari satu teori dalam menyusun kerangka teoritis.
- d. Triangulasi metode, yang meliputi triangulasi dalam metode dan triangulasi antar metode. Triangulasi dalam metode diartikan menggunakan cara berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi antar metode diartikan dengan menggunakan beberapa alat yang berbeda pada sumber data yang sama.

Triangulasi, menurut Satori dan Komariah (Satori & Komariah, 2020:212) adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Tiga jenis triangulasi menurut Satori dan Komariah tersebut yaitu:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terikat satu sama lain.
2. Triangulasi teknik dilakukan penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Satori & Komariah, 2020:212-214).

Dari jenis-jenis triangulasi tersebut di atas, dalam penelitian ini digunakan triangulasi data/triangulasi sumber serta triangulasi metode/teknik. Triangulasi sumber/data meliputi: narasumber dari pihak perencana/perumus kebijakan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji); narasumber dari pihak pelaksana kebijakan (Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Mesuji); narasumber dari pihak independent/lembaga survey (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji). Sedangkan triangulasi metode/teknik meliputi : wawancara, *Focus Group Discussion* dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

4.1.1 Pembentukan, Lokasi Geografis dan Demografi

Kabupaten Mesuji dibentuk pada tahun 2008, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Pembentukan Kabupaten Mesuji ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

Kabupaten Mesuji, yang terletak di bagian timur laut Provinsi Lampung, merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis memiliki posisi strategis dalam peta wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung serta dengan Provinsi Sumatera Selatan, menjadikannya sebagai daerah lintas yang penting baik dari segi mobilitas penduduk maupun distribusi barang dan jasa. Luas wilayah Kabupaten Mesuji mencapai 2.184,00 km², yang terbagi menjadi beberapa kecamatan dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda, baik dari segi topografi, jenis tanah, hingga kondisi iklim.

Berikut ini daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji:

Tabel 7. Kecamatan, Luas dan Penduduk di Kabupaten Mesuji 2021

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Way Serdang	Bukoposo	304,43	45.987	151,06
2	Simpang Pematang	Simpang Pematang	166,38	29.282	175,99
3	Panca Jaya	Adi Luhur	96,27	18.818	195,47
4	Tanjung Raya	Brabasan	357,00	43.858	122,85
5	Mesuji	Wiralaga	267,38	23.756	88,85
6	Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur	718,78	40.291	56,05
7	Rawa Jitu Utara	Panggung Jaya	273,76	27.780	101,48
Kabupaten Mesuji			2.184,00	229.772	105,21

Sumber : BPS Mesuji (2022: 8, 48, 49)

Secara demografis, di tahun 2022 Kabupaten Mesuji dihuni oleh lebih dari 229.000 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Populasi ini terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, mencerminkan keragaman budaya dan tradisi lokal yang menjadi salah satu kekayaan sosial kabupaten ini. Kepadatan penduduk di wilayah ini cenderung bervariasi, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di daerah-daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan. Namun, sebagian besar wilayah di Kabupaten Mesuji masih bersifat rural dengan tingkat urbanisasi yang relatif rendah.

Kondisi demografi di Mesuji juga dipengaruhi oleh dinamika migrasi penduduk, baik migrasi masuk maupun keluar. Sebagian penduduk Mesuji merantau ke kota-kota besar di luar daerah untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, sementara di sisi lain, terdapat pula arus migrasi masuk dari daerah lain yang tertarik oleh peluang ekonomi di sektor-sektor tertentu seperti perkebunan dan pertanian.

Dinamika ini berkontribusi pada perubahan struktur demografis kabupaten dari waktu ke waktu.

4.1.2 Perekonomian Daerah dan Sumber Pendapatan Utama

Perekonomian Kabupaten Mesuji didominasi oleh sektor pertanian, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi mayoritas penduduknya. Perkebunan kelapa sawit, karet, dan tanaman pangan seperti padi dan jagung merupakan komoditas utama yang dihasilkan di kabupaten ini. Selain itu, sektor perikanan dan peternakan juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal, meskipun skalanya masih relatif kecil dan bersifat subsisten.

Meski sektor pertanian menjadi tumpuan utama, Kabupaten Mesuji juga mulai mengembangkan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan jasa untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan yang menghubungkan kabupaten ini dengan daerah lain telah mendorong pertumbuhan perdagangan lokal, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas dan transportasi, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mesuji sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi yang dikenakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, kontribusi PAD terhadap anggaran daerah masih terbatas, sehingga kabupaten ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Dalam tahun anggaran 2022, dari realisasi pendapatan sebesar Rp.858.673.942.804,18, pendapatan asli daerah hanya sebesar Rp.69.568.345.379,18. Selebihnya adalah pendapatan dari dana transfer sebesar Rp.784.230.772.333,00, pendapatan hibah sebesar

Rp.4.652.800.452,00 dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan sebesar Rp.222.024.640,00 (Pembab Mesuji, 2023).

1.1.1 Kondisi Sektor Pembentuk IPM : Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Sektor Ekonomi di Kabupaten Mesuji

Di sektor pendidikan, meskipun terjadi peningkatan jumlah fasilitas pendidikan, distribusi fasilitas dan kualitas pendidikan yang belum optimal masih menjadi hambatan besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama dengan capaian Indeks Pendidikan yang masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung.

Sementara itu, sektor kesehatan menghadapi permasalahan serupa, di mana fasilitas kesehatan terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, sementara wilayah rural masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Dari segi ekonomi, mayoritas penduduk Kabupaten Mesuji menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan, namun fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan akses terhadap pasar menyebabkan kurang stabilnya pendapatan masyarakat.

Kabupaten Mesuji memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kombinasi dari ketiga faktor ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji dan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan di Kabupaten Mesuji menghadapi tantangan yang hampir serupa dengan sektor pendidikan, terutama dalam hal distribusi fasilitas kesehatan. Fasilitas Rumah Sakit masih berada di daerah yang infrastrukturnya mudah dijangkau seperti Kecamatan Simpang Pematang, Tanjung Raya dan Mesuji. Data jumlah fasilitas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Mesuji tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 8. Data Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mesuji

Kecamatan	Rumah Sakit		Puskesmas		Klinik Pratama	Posyandu
	Umum	Khusus	Rawat Inap	Non Rawat Inap		
Way Serdang	-	-	1	1	1	22
Simpang Pematang	1	-	1	1	1	17
Panca Jaya	-	-	1	-	1	14
Tanjung Raya	1	-	-	-	1	24
Mesuji	-	-	1	2	-	19
Mesuji Timur	-	-	2	2	-	23
Rawajitu Utara	-	-	1	-	2	23
Mesuji	2	-	7	6	6	142

Sumber : Data Fasilitas Kesehatan (BPS Mesuji, 2020a)

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di daerah rural berdampak langsung pada indikator kesehatan masyarakat, seperti angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi penyakit menular. Pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan. Gerakan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam upaya

meningkatkan Indeks Kesehatan sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Usia harapan hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 adalah 68,51.

b. Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan di Kabupaten Mesuji mengalami perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi kendala terutama untuk menekan angka putus sekolah. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih menjadi masalah untuk diatasi. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Mesuji pada tahun 2022 sebesar 7,09 dan harapan lama sekolah sebesar 11,80.

Salah satu tantangan bidang pendidikan adalah dalam hal distribusi fasilitas dan kualitas pendidikan. Sebaran jumlah sekolah, terutama sekolah menengah atas (SMA dan SMK) masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau kecamatan-kecamatan dengan infrastruktur yang lebih baik, seperti Kecamatan Simpang Pematang, Tanjung Raya dan Mesuji.

Tabel 9. Data Sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2022

No	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK
		Jml	Jml	Jml	Jml
1	Kec. Tanjung Raya	24	10	2	5
2	Kec. Way Serdang	29	12	3	2
3	Kec. Mesuji Timur	23	8	2	3
4	Kec. Simpang Pematang	16	8	3	4
5	Kec. Mesuji	16	7	3	2
6	Kec. Rawajitu Utara	16	6	1	1
7	Kec. Panca Jaya	11	3	1	2
Total	Total	135	54	15	19

Sumber : Data Pokok Pendidikan (Kemendikdasmen, 2022)

Salah satu permasalahan di bidang pendidikan adalah adanya siswa yang melanjutkan sekolah ke luar Mesuji, sehingga tidak dapat dihitung untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mesuji. Hal ini menjadi evaluasi terkait dengan mutu pendidikan di Mesuji, seperti diungkapkan oleh Kabid Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji (Rakhmi Pratiwi) yang menyatakan bahwa dengan banyaknya siswa yang melanjutkan pendidikan keluar Mesuji, harus menjadi evaluasi terkait mutu pendidikan di Mesuji.

Untuk mengatasi angka putus sekolah yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mendorong kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk penyetaraan kelulusan sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pendidikan. Pendidikan non formal seperti pondok pesantren salafiyah yang cukup banyak di Kabupaten Mesuji dan tidak terdaftar secara resmi di dinas terkait. Terkait hal ini mulai dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar kegiatan belajar di pondok pesantren dapat didaftarkan secara resmi dan memenuhi persyaratan untuk dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah.

Di samping itu, sejak 2018 Dinas Sosial juga telah menyosialisasikan program ayo sekolah dan program pintar agar siswa menyelesaikan pendidikan di tingkat Universitas dan dilakukan pengawalan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) serta Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dari IPM.

c. Sektor Ekonomi

Sebagian besar penduduk Mesuji bergantung pada sektor agraris dengan pendapatan yang fluktuatif karena ketergantungan pada harga

komoditas pertanian. Akibatnya daya beli masyarakat terbatas, yang berpengaruh langsung pada dimensi standar hidup layak dalam IPM. Persentase PDRB per sektor dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Persentase PDRB Kabupaten Mesuji Berdasarkan Lapangan Usaha 2020-2022

Kategori	Uraian	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,23	40,40	39,79
B	Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,59	0,56
C	Industri Pengolahan	24,83	25,43	24,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,87	8,26	8,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mo- bil dan Sepeda Motor	11,22	11,32	13,13
H	Transportasi dan Pergudangan	1,75	1,76	2,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,99	0,95	1,01
J	Informasi dan Komunikasi	2,22	2,19	2,02
K	Konstruksi	0,35	0,37	0,35
L	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,49	2,42	2,35
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	2,93	2,74
P	Jasa Pendidikan	2,37	2,35	2,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,50	0,50	0,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,38	0,36	0,44
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100

Sumber : BPS Mesuji (2023:32)

Indikator yang digunakan untuk dimensi standar hidup layak dalam pengukuran IPM adalah pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Kabupaten Mesuji tahun 2022 adalah Rp.8.466.000,00, masih di bawah rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Lampung sebesar Rp.10.366.000,00.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran per kapita Kabupaten Mesuji berada di bawah rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Lampung adalah karena kurang bervariasinya pengeluaran masyarakat sehingga tingkat pengeluarannya lebih rendah. Hal ini dikemukakan oleh Kepala BPS Kabupaten Mesuji, Zulkifli:

“Memang nilai konsumsi masyarakat Mesuji sangat tidak bervariasi karena, memang kondisi barang dan segala macamnya untuk mendapatkan yang bermacam-macam harus ke luar, sehingga lebih terpaku terhadap misalnya hasil-hasil pertanian.”

Tidak bervariasinya pengeluaran masyarakat bisa disebabkan oleh kurang meratanya penyebaran sarana perdagangan. Data sarana perdagangan di Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Mesuji
2018-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021
Pasar	31	33	37	27
Toko	22	26	38	89
Kios	-	-	-	-
Warung	3.085	3.173	2.771	3.080
Jumlah	3.138	3.232	2.846	3.196

Sumber: BPS Mesuji, (2022:205)

Selain sarana perdagangan, tidak kalah penting adalah sarana infrastruktur jalan dan sarana transportasi juga perlu mendapat

perhatian serius untuk meningkatkan kelancaran akses dari dan menuju Kabupaten Mesuji sehingga bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Mesuji masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan IPM, pemerintah daerah terus berfokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

4.2 Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji

4.2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program

Program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji dilatarbelakangi oleh ketertinggalan capaian IPM kabupaten ini dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah menyadari bahwa peningkatan IPM merupakan kunci untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, berbagai program telah dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan IPM di Kabupaten Mesuji.

Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap layanan publik. Selain itu, program ini juga didukung oleh kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan manusia, seperti penyediaan anggaran yang memadai, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan utama dari program peningkatan IPM di Kabupaten Mesuji adalah sebagai usaha percepatan dalam peningkatan IPM dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan meningkatkan derajat kesehatan serta perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan di tiga dimensi utama IPM, yaitu pengetahuan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mendorong motivasi dan memperluas akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sasaran program ini mencakup seluruh penduduk Kabupaten Mesuji, dengan fokus khusus pada kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin. Program ini juga dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap layanan publik, dengan mengutamakan daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam pembangunan.

4.2.3 Ruang Lingkup Program per Sektor dan Instansi Terkait

Ruang lingkup program peningkatan IPM di Kabupaten Mesuji meliputi berbagai sektor yang saling terkait, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ruang lingkup program dan sektor-sektor yang terlibat sebagai berikut:

Tabel 12. Ruang Lingkup Program per Sektor dan Instansi Terkait

Sektor	Ruang Lingkup Program	Instansi Terkait
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan layanan kesehatan dasar (UKM dan UKP); ▪ Pelayanan kesehatan ibu bersalin; ▪ Peningkatan gizi masyarakat; ▪ Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; ▪ Pengelolaan program KKBPK di kampung KB. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan; ▪ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; ▪ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan pendidikan (peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah); ▪ Peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan; ▪ Beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu; ▪ Pengembangan kesenian tradisional; pembinaan sejarah; pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; ▪ Dinas Sosial
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan; ▪ Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM; ▪ Pengembangan usaha ekonomi produktif di pedesaan; ▪ Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan ketersediaan bahan pokok; ▪ Stabilisasi harga, ketersediaan pasokan dan peningkatan kualitas data; ▪ Peningkatan kualitas data stok dan harga kebutuhan pokok; ▪ Peningkatan infrastruktur perdagangan; ▪ Pelayanan antar kerja; Pelatihan kerja; ▪ LKS Tripartit Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; ▪ Dinas Pertanian; ▪ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; ▪ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; ▪ Bagian Ekonomi dan SDA; ▪ Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari Data Pemkab Mesuji

Selain instansi di atas, program tersebut juga melibatkan pihak-pihak di luar Pemerintah Kabupaten Mesuji seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait dengan program yang berhubungan dengan KB, Kementerian Agama terkait program yang berkenaan dengan pendidikan di pondok pesantren, perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai pemangku termasuk masyarakat.

4.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji

Selama periode 2018-2022, tren IPM Kabupaten Mesuji telah mengalami peningkatan, meskipun laju peningkatannya masih belum mampu membuat Kabupaten Mesuji mengejar ketertinggalan capaian IPMnya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Peningkatan IPM selama periode ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk implementasi program-program yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, efektivitas monitoring dan evaluasi, serta kurangnya koordinasi antar sektor.

Dari tahun 2018 dengan IPM 62,88 pada tahun 2022 telah mencapai 64,94 di mana rata-rata IPM Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 70,45. Dengan skor IPM ini, Kabupaten Mesuji belum bisa meningkatkan kategori IPM dari kategori sedang (60 s.d. kurang dari 70) menjadi kategori tinggi (70 sampai dengan 80) dan sangat tinggi (lebih dari 80).

IPM Kabupaten Mesuji masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Lampung, dan juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di provinsi ini. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mesuji masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan

kualitas hidup masyarakatnya, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Salah satu titik lemah IPM Mesuji adalah pada dimensi pengetahuan (pendidikan) di mana harapan lama sekolah pada tahun 2022 dengan angka 11,8 merupakan yang terendah dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Rata-rata lama sekolah di tahun 2022 juga berada pada posisi terendah pada angka 7,09. Usia harapan hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Mesuji tahun 2022 sebesar 68,51 merupakan terendah ke-3 di atas Kabupaten Lampung Barat (67,90) dan Kabupaten Pesisir Barat (63,99). Untuk pengeluaran per kapita, Kabupaten Mesuji berada pada terendah ke-2 dengan pengeluaran per kapita tahun 2022 sebesar Rp.8.466.000,00, di atas Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.8.192.000,00.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan ini melalui berbagai program dan kebijakan yang lebih terfokus dan tepat sasaran. Diharapkan dengan adanya sinergi antara berbagai sektor dan peningkatan partisipasi masyarakat, IPM Kabupaten Mesuji dapat terus meningkat dan mendekati rata-rata provinsi dalam beberapa tahun ke depan.

VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan data primer dari *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara serta data sekunder dari berbagai sumber, tergambar bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mesuji oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Peningkatan IPM Kabupaten Mesuji Tahun 2018-2022 sebesar 2,06 dari 62,88 pada tahun 2018 menjadi 64,94 pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang baik sebesar 3,36% per tahun atau 0,81% per tahun dan menjadi pertumbuhan IPM tertinggi kedua setelah Kabupaten Pesisir Barat. Tingkat pertumbuhan yang baik tersebut belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD dan belum mengubah posisi Kabupaten Mesuji dalam perolehan IPM di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Salah satu penyebab posisi IPM Kabupaten Mesuji belum berubah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung, karena sejak awal sudah tertinggal cukup jauh dari rata-rata IPM Provinsi. Di samping itu terdapat hal-hal yang teridentifikasi menyebabkan sulitnya mencapai lompatan IPM yang signifikan antara lain: intervensi kebijakan belum dapat mengubah *mindset* masyarakat yang kurang memandang penting pendidikan; pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan yang masih kurang; akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil yang masih sulit; dominasi sektor informal, tingkat pendapatan dan kurangnya lapangan pekerjaan formal; kondisi infrastruktur yang kurang mendukung, sinkronisasi dan efektivitas kebijakan dalam penyusunan program, anggaran, koordinasi antar instansi; monitoring dan evaluasi yang kurang efektif; serta akurasi dan basis data yang kurang tepat.

Perbedaan basis data dalam mengukur angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang digunakan oleh BPS, di mana batas kemiskinan diukur menggunakan pendekatan konsumsi dan tingkat kesejahteraan diukur dengan pengeluaran per kapita, mungkin menjadi salah satu faktor yang dapat mengungkap fenomena angka kemiskinan di Kabupaten Mesuji merupakan yang terendah di Provinsi Lampung tetapi tingkat kesejahteraan dalam perhitungan IPM juga rendah. Namun untuk membuktikan hal ini dibutuhkan penelitian tersendiri.

Dari analisis terhadap aspek terlemah yang dapat menjadi pengungkit peningkatan IPM Kabupaten Mesuji, ditemukan bahwa Indeks Pengetahuan, yang terdiri dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian serius. RLS Kabupaten Mesuji tahun 2022 sebesar 7,09 dan HLS 11,80 merupakan yang terendah di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program untuk peningkatan IPM oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji pada sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi, juga terdapat hambatan yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti koordinasi antar OPD yang kurang optimal dalam menyatukan persepsi terhadap perumusan tujuan dan target dari program, kurang jelasnya tolok ukur keberhasilan, tidak efektifnya monitoring dan evaluasi dan keterbatasan PAD sebagai sumber pendanaan sendiri. Faktor eksternal antara lain adalah pelibatan partisipasi masyarakat dan *stake holder lainnya* dalam program, kondisi ekonomi seperti penurunan ekonomi karena dampak wabah covid-19, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dana transfer dan dana hibah.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan ke depan adalah bahwa proses pembangunan manusia hendaknya menjadi suatu proses yang komprehensif dan holistik dari sejak perumusan dan penentuan target, pengorganisasian, implementasi serta monitoring dan evaluasi. Penting untuk dicatat bahwa

pembangunan manusia tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai sasaran atau obyek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku atau subyek yang juga perlu turut berperan aktif untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut. Karenanya, pelibatan masyarakat dan semua *stake holder* menjadi penting untuk perbaikan program-program pembangunan manusia untuk waktu yang akan datang.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah Kabupaten Mesuji

1. Peningkatan Intervensi Kebijakan Pada Sektor Pendidikan Sebagai Aspek Pengungkit IPM

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, tergambar bahwa dimensi pengetahuan atau sektor pendidikan merupakan titik terlemah dalam komponen pembentuk IPM di Kabupaten Mesuji. Hal ini terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2022 sebesar 7,09 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,80 merupakan yang terendah di Provinsi Lampung. RLS dan HLS ini sangat mempengaruhi Indeks Pengetahuan yang membentuk IPM. RLS dan HLS yang menjadi titik terlemah ini sekaligus menjadi pengungkit yang signifikan bila dapat ditingkatkan.

Salah satu kendala terbesar dalam bidang pendidikan di Kabupaten Mesuji adalah bahwa masih terdapat persepsi masyarakat yang lebih mementingkan bekerja dari pada pendidikan. Maka salah satu program yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mesuji adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat terkait dengan pentingnya pendidikan. Hal ini akan sangat berhubungan dengan angka-angka pembentuk Indeks Pendidikan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS),

Program penyadaran tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat harus dilakukan secara intensif dan tepat sasaran, terutama di wilayah perdesaan dan warga yang bekerja di sektor informal. Program ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu karena mengubah *mindset* yang telah tertanam lama bahwa pendidikan tidak penting karena tanpa pendidikanpun masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, bukan hal yang mudah.

Program ini antara lain dapat dilakukan dengan kampanye pentingnya pendidikan. Kampanye ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, swasta ataupun *stake holder* terkait lainnya untuk memperkuat kesadaran akan manfaat jangka panjang dari pendidikan.

Di samping kampanye secara langsung, dapat dilakukan Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji untuk menggulirkan program beasiswa bagi karyawan yang sudah bekerja maupun CSR bagi masyarakat lainnya, serta penentuan persyaratan pendidikan dalam proses rekrutmen. Program untuk mengatasi putus sekolah seperti PKBM harus dievaluasi dan diperkuat dengan insentif yang lebih besar bagi masyarakat agar lebih tertarik untuk melanjutkan pendidikan formal.

Selain hal tersebut, tantangan di bidang pendidikan yang perlu diperhatikan adalah adanya migrasi pendidikan, di mana pelajar berprestasi yang mampu secara ekonomi memilih melanjutkan pendidikan ke luar Kabupaten Mesuji. Ini mengindikasikan pentingnya upaya meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mengurangi terjadinya migrasi pendidikan.

Untuk mendukung efektivitas peningkatan intervensi kebijakan di bidang pendidikan, perlu didukung kekuatan anggaran yang memadai. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan, bahwa anggaran dalam bidang pendidikan masih tergolong minim, misalnya terkait anggaran untuk mengatasi angka putus sekolah dengan penyetaraan pendidikan melalui PKBM masih cukup minim.

2. Mempertahankan dan Meningkatkan Tingkat Pertumbuhan IPM

Pada periode 2018-2022 IPM Kabupaten Mesuji tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,28 persen dalam empat tahun atau 0,81 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji ini cukup baik dan merupakan pertumbuhan tertinggi kedua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Pesisir Barat dengan pertumbuhan 3,46 persen selama empat tahun atau 0,85 persen per tahun.

Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji sebesar 1,16 % per tahun atau 2,34 % selama dua tahun. Pada periode ini pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Pesisir Barat dan Pesawaran. Pertumbuhan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023-2024 berada pada urutan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 1,36 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan pertumbuhan sebesar 1,21 % per tahun dan Kabupaten Mesuji sebesar 1,16 % per tahun.

Meskipun tingkat pertumbuhan cukup baik, namun jarak dengan rata-rata provinsi masih tetap lebar. Upaya perbaikan IPM di Kabupaten Mesuji berhasil memperkecil jarak ketertinggalan dengan rata-rata IPM Provinsi, namun belum signifikan. Masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan, baik dalam hal perencanaan maupun implementasi kebijakan, guna memastikan bahwa IPM Kabupaten Mesuji terus

meningkat dan mencapai target yang diharapkan. Yang perlu diingat adalah pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji masih berada di bawah Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan urutan kedua terbawah dalam capaian IPM setelah Kabupaten Mesuji. Maka Kabupaten Mesuji harus mengejar pertumbuhan di atas Kabupaten Pesisir Barat bila ingin keluar dari posisi terbawah dalam capain IPM di Provinsi Lampung.

3. Penguatan Pada Dimensi Kesehatan dan Ekonomi

Meskipun aspek terlemah dalam IPM di Kabupaten Mesuji adalah dimensi pendidikan, namun dimensi kesehatan dan ekonomi tetap perlu mendapat perhatian yang serius. Apalagi sektor ekonomi (Indeks Pengeluaran) Mesuji juga hampir merupakan yang terbawah di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pada dimensi kesehatan, pembangunan infrastruktur kesehatan, terutama di wilayah terpencil, harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Selain itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi terkait layanan kesehatan preventif yang lebih merata di semua lapisan masyarakat. Pemerintah juga dapat memperluas jaringan kader kesehatan yang berfungsi sebagai penghubung antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat di desa-desa yang sulit dijangkau.

Pada dimensi ekonomi, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal dan menurunkan tingkat pengangguran semu, pemerintah perlu mendorong peningkatan lapangan kerja formal melalui pelatihan keterampilan, pemberian insentif kepada perusahaan lokal,

dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Di samping penguatan sektor formal, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berbasis kewirausahaan. Langkah ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat serta menyediakan akses modal yang lebih mudah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini juga akan membantu mengurangi tingkat pengangguran terselubung yang menjadi salah satu tantangan utama dalam struktur ekonomi Mesuji.

Kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini akan membuat Mesuji lebih stabil secara ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jangka panjang. Penguatan manajemen UMKM juga perlu dilakukan sehingga meskipun berada pada skala kecil tetapi dengan penerapan manajemen yang lebih modern akan dapat mendorong pertumbuhan usaha dan kompetensi tenaga kerjanya. Pengembangan sektor ekonomi lokal ini perlu didukung oleh perbaikan infrastruktur, sehingga produk lokal dapat dipasarkan lebih efektif dan memberikan dampak langsung pada pendapatan masyarakat.

Penguatan pada dimensi kesehatan dan perekonomian ini tentu juga perlu didukung dalam penyusunan anggaran maupun dukungan pendanaan dari sumber selain anggaran seperti CSR dari perusahaan untuk pengembangan UMKM, sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan efektif.

4. Pembenahan Infrastruktur

Infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat terkait layanan pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Kondisi infrastruktur jalan dan sarana perdagangan perlu ditingkatkan agar mempermudah akses hubungan perekonomian Kabupaten Mesuji dengan daerah lain sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga.

Peningkatan kesejahteraan warga akan tercermin dalam Indeks Pengeluaran yang meningkat karena kondisi perekonomian yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih besar sehingga meningkatkan daya beli, serta kemudahan memenuhi kebutuhan karena akses untuk mendapatkan barang dan jasa yang lebih mudah.

Selain infrastruktur jalan dan perdagangan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi terutama di daerah perdesaan juga perlu ditingkatkan sehingga mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Peningkatan Koordinasi Antar Sektor

Koordinasi antar OPD dari sejak perumusan program, implementasi, maupun evaluasi. Diperlukan kesamaan persepsi dan gerak langkah dari semua instansi terkait, karena IPM terbentuk dari berbagai sektor yang dapat saling mempengaruhi. Kesamaan persepsi terhadap sasaran yang ingin dicapai akan membuat program lebih terarah. Koordinasi intensif akan menyelaraskan program-program kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing sehingga akan lebih efektif mencapai sasaran. Pembentukan tim kerja lintas sektor yang berfokus

pada peningkatan IPM di setiap bidang dan kewilayahan diperlukan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi.

Koordinasi lebih intensif juga perlu dilakukan dengan instansi terkait di luar organ Pemerintah Kabupaten Mesuji seperti Kementerian Agama yang menaungi pendidikan di pesantren, BKKN yang menangani program KB serta BPS yang menyediakan data-data terkait capaian-capaian hasil pembangunan sebagai bahan untuk evaluasi dan perumusan kebijakan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk dukungan swasta juga diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan.

6. Monitoring dan Evaluasi Program Secara Berkala.

Kurangnya monitoring dan evaluasi program sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya menjadi salah satu titik lemah, di mana belum ada monitoring dan evaluasi khusus untuk program-program yang terkait dengan peningkatan IPM. Tanpa monitoring dan evaluasi secara spesifik, akan menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas program pada saat implementasi sehingga jika terjadi ketidaktepatan implementasi tidak dapat segera dilakukan langkah perbaikan.

Pemantauan dan evaluasi program secara berkala menjadi langkah yang sangat penting dalam memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Program yang berjalan tanpa evaluasi yang ketat sering menjadi penyebab program yang dilaksanakan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem monitoring yang terstruktur agar setiap program yang dijalankan dapat diukur dampaknya dan dievaluasi secara tepat waktu. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan dan memastikan bahwa program-program tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan IPM.

7. Optimalisasi Penggunaan Data dalam Perumusan Kebijakan

Pemerintah memastikan bahwa pendataan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat menyajikan data yang lengkap dan akurat sehingga data yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pendataan yang akurat akan memudahkan dalam mengevaluasi kebijakan dan merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendataan dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan BPS sebagai lembaga yang telah memiliki metode yang diakui dalam pendataan secara ilmiah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat menjadikan BPS sebagai mitra konsultatif dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pembangunan, khususnya pembangunan manusia.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji diharapkan dapat mempercepat peningkatan IPM, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, serta meningkatkan kualitas hidup di berbagai sektor. Evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya

tujuan pembangunan manusia di Mesuji secara komprehensif dan berkelanjutan.

6.2.2 Rekomendasi Pengembangan Penelitian Ilmiah

Pada ranah akademik, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dikembangkan dari penelitian ini menjadi tema-tema penelitian berikutnya antara lain:

1. Analisis kritis terhadap pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, berkaitan dengan keselarasan program peningkatan IPM oleh pemerintah dengan pengukuran indikator-indikator IPM oleh BPS.
2. Kajian kritis dalam penggunaan basis data untuk mengukur indikator kesejahteraan masyarakat: angka kemiskinan dan Indeks Pengeluaran.
3. Sinkronisasi Program dan Anggaran dalam Peningkatan IPM.
4. Analisis komprehensif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapana (ed.); 1st ed.). Syakir Media Press.
- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan* (N. H. Afandi (ed.); 1st ed.). CV. Bintang Semesta Media.
- Arafat, L., & Rindayati, W. (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah*. 7(2).
- Bangun, W. (2021). *Pembangunan Sumber Daya Manusia, Teori dan Kasus di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN Lainnya* (D. Safitri (ed.); 1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Bappelitbangda Mesuji. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia, Potret Situasi dan Rencana Kegiatan, Kabupaten Mesuji Lampung*.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021* (Issue 87).
- BPS Lampung. (2020). *Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*.
- BPS Lampung. (2022). *Harapan Lama Sekolah (tahun)*.
<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQyIzI=/harapan-lama-sekolah.html>
- BPS Lampung. (2023a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2010)*.
<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzUjMg==/indeks-pembangunan-manusia--ipm-uhh-sp2010-.html>
- BPS Lampung. (2023b). *Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)*.
<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTUyIzI=/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-.html>
- BPS Lampung. (2023c). *Persentase Penduduk Miskin (persen)*.
<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>
- BPS Lampung. (2023d). *Rata-Rata Lama Sekolah (Metode Baru) (tahun)*.

<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQzIzI=/rata-rata-lama-sekolah-metode-baru-.html>

BPS Lampung. (2023e). *Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (SP2010) (tahun)*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDMjMg==/umur-harapan-hidup-saat-lahir--uhh---sp2010-.html>

BPS Lampung. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota (milyar rupiah)*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/produk-domestik-regional-bruto-menurut-kabupaten-kota.html>

BPS Mesuji. (2020a). *Data Jumlah Fasilitas Kesehatan 2020*. <https://mesujikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YmlzemNGUkNVblZLVVhObIREWnZXbkEzWld0eVVUMDkjMw==/jumlah-rumah-sakit-umum--rumah-sakit-khusus--puskesmas--klinik-pratama--dan-posyandu-menurut-kecamatan-di-kabupaten-mesuji--2020.html%0A>

BPS Mesuji. (2020b). *Nilai Produksi Perikanan Tangkap*.

BPS Mesuji. (2022a). Kabupaten Mesuji dalam Angka 2022. *Mesuji Dalam Angka 2022*, 18110.2201, xxxvi + 234. <https://mesujikab.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/98250a2867a6f4b30e3a707a/kabupaten-mesuji-dalam-angka-2022.html>

BPS Mesuji. (2022b). *Statistik Daerah Kabupaten Mesuji 2022*.

BPS Mesuji. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Mesuji 2023*. <https://mesujikab.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/c2833fe799c7c8bd51006740/statistik-daerah-kabupaten-mesuji-tahun-2023.html>

BPS Mesuji. (2025). *Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Mesuji (km)*. <https://mesujikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTkjMg==/panjang-jalan-menurut-kondisi-jalan-di-kabupaten-mesuji.html>

Digdowniseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan* (Eko Sugiyanto (ed.); 1st ed.). LPU-UNAS. [http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku Teori Pembangunan.pdf](http://repository.unas.ac.id/652/1/Buku%20Teori%20Pembangunan.pdf)

Fajri, R. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *C, 1*(1), 212–222.

- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143–167. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>
- Filgueiras, F., & Queiroz, L. de F. N. (2021). The Governance of Public Policy Evaluation Systems: Policy Effectiveness and Accountability. *Organizações & Sociedade*, 28(96), 208–232. <https://doi.org/10.1590/1984-92302021v28n9609en>
- Harahap, D. A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal (I)*. CV Nur Lina Bekerjasam dengan Piustaka Taman Ilmu.
- Hasibuan, L. S., Rujiman, & Sukardi. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(2), 139–141. <https://jurnal-ip2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/470>
- Himo, J. T., Rotinsulu, D. C., & D., K. T. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 124–135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42238/37378>
- Ikbar, Y. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (2nd ed.). PT Refika Aditama.
- Kemendikdasmen. (2022). *Data Jumlah Sekolah di Mesuji 2022*. <https://dapo.dikdasmen.go.id/sp/2/121100%0A>
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202–216. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/17421>
- Lewis, M. R. (2023). Cara Menghitung Persentase Pertumbuhan Tahunan. In

- wikiHow. <https://id.wikihow.com/Menghitung-Persentase-Pertumbuhan-Tahunan>
- Mahasiswa Sosiologi. (2017). *Ketimpangan Dalam Pembangunan, Bunga Rampai Realitas Sosial Atas Ketimpangan Pembangunan di Indonesia* (1st ed.). Media Nusa Creative.
- Mahuze, W., Masinambow, V. A. J., & Lopian, A. L. C. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 1–12.
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Maryadi, A. D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas*, 3 No.1(1), 16. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538>
- Nugroho, A., Clarissa, A., & Utami, N. P. C. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2021* (W. Winardi & Y. Karyono (eds.); 07300.2207). Badan Pusat Statistik.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2021). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (1st ed., Issue April, pp. vi, 153).
- Nurkholis, A. (2016). Teori Pembangunan Manusia. *Ina Rvix Paper*, 1–16. <https://osf.io/preprints/inarxiv/8trv7/>
- Pemkab Mesuji. (2023). *Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (Lampiran 1 Peraturan Daerah Mesuji Nomor 01 Tahun 2023)*. <https://web.mesujikab.go.id/pages/ipkd/preview/item.php?id=43&sid=28&pid=55>
- Peraturan Bupati Mesuji Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mesuji, Pub. L. No. No.9/2021 (2021).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji 2017-2022, Pub. L. No. No.11/2017 (2017).
- Pratiwi, T. R., & Nurdiawansyah. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013 - 2015*. 10(2), 99–118. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/1290>
- Purwoko. (2015). *Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan*. 1(2), 45–59. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1619>
- Rahmat, D., & Bachtiar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–16.
- RI, K. (2016). *KBBI Daring*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kebijakan>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani (ed.); 5th ed.). PT Kanisius.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (8th ed.). CV Alfabeta.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1373>
- Shareia, B. F. (2015). Theories of Development. *International Journal of Language and Linguistics*, 2(1), 78–90. https://ijllnet.com/journals/Vol_2_No_1_March_2015/9.pdf
- Susanto, E. R., & Puspaningrum, A. S. (2020). Model Prioritas Program Pemerataan Ipm Di Provinsi Lampung Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Teknoinfo*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.33365/jti.v14i1.543>
- Unas, T. D. S. (2020). *Statistika Sosial, Teori dan Aplikasi Untuk Mahasiswa dan Peneliti Ilmu-Limu Sosial* (L. P. Sinambela & E. E. Chotim (eds.); 2nd ed.).

PT RajaGrafindo Persada.

Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik* (Monalisa (ed.); 2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Wiriana, I. G. dan I. N. K. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012 - 2018. *E-Jurnal EP Unud*, 9[5](3), 1051–1081.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/56966>

Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 32–50.
<https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>

Yogi, Pradono, & Aritenang, A. (2018). *Pengantar Ekonomika Wilayah Pendekatan Analisis Praktis* (F. Anugrah (ed.)). Penerbit ITB.

Yusrizal. (2015). *Tanya Jawab Seputar Pengukuran Penilaian dan Evaluasi*. 1–315.